ENEWSLETTER
PKSPARLEMEN
KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF
Edisi April I Tahun 2021 No. 12

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. Johan Rosihan, S.T

Bencana Tak Biasa, Hadapi dengan Kebersamaan

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Bencana Tak Biasa, Hadapi dengan Kebersamaan

Bencana datang silih berganti, namun cara kita merespon harus penuh dengan kecermatan dan antisipasi. Negeri bencana bukan hanya Indonesia, terbentang dari timur ke barat. Kita bisa belajar banyak cerita dan kisah orang lain, sembari terus memperbaiki cara kita menerima keadaan.

Saat ini kita mengalami bencana bukan hanya yang terkait dengan alam, tapi juga dengan non alam seperti covid19. Secara faktual situasi ini menjadi pengalaman baru untuk kita semua, gagap diawal dan rentan hingga kini. Mencari bentuk dan strategi yang tepat agar bisa bertahan dan melewati seluruh rintangan ini. Kita yakin dibalik kesulitan ada kemudahan, jika disikapi dengan kesabaran dan syukur.

Proses aktif menempuh jalan sabar dan syukur harus dilakukan secara kolektif dalam menghadapi bencana, bergandengan tangan bersama-sama. Dalam kondisi tidak biasa ruang kesadaran kita harus tetap hidup agar tidak mudah panik, sebagaimana ruang keyakinan yang membuat kita tetap punya nyala semangat bagi hari esok ada asa.

Indonesia adalah negeri bencana, sudah banyak kejadian dan kajian. Perlu pengetahuan lebih untuk terus belajar memitigasi, mer-recovery dan merahabilitasi. Tidak boleh berhenti dan lelah, darinya kita akan menjadi lebih baik dan kuat.

Bencana baru-baru ini menimpa Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) kemudian Malang. Kita tidak pernah tau daerah mana lagi yang akan tertimpa, namun sikap dan respon tidak boleh abai dan lambat. Agresivitas akan menentukan kualitas penanganan kita terhadap bencana, kemauan belajar terus menerus menjadi kunci.

Bencana ini telah banyak meninggalkan luka dan nestapa, maka bagi orang-orang yang didapuk memegang kuasa tidak boleh abai dan lalai apalagi sampai berlaku culas. Memotong jatah bantuan, korupsi berjaamah bantuan sosial dan mencari panggung sempit. Ada banyak orang yang awalnya berdaya, kemudian jadi papa dan hilang raga.

Peran oposisi dalam kondisj bencana diperankan dengan maksimal, selain melakukan kritisi dengan solusi. Juga berikhtiar sungguh-sungguh untuk berkontribusi lakukan berbagai aksi nyata seperti potong gaji, berikan donasi hingga terjun langsung ke daerah pengungsi.

Bencana datang silih berganti, namun cara kita merespon harus penuh dengan kecermatan dan antisipasi. Negeri bencana bukan hanya Indonesia, terbentang dari timur ke barat. Kita bisa belajar banyak cerita dan kisah orang lain, sembari terus memperbaiki cara kita menerima keadaan. Kearifan lokal, penetrasi pengetahuan dan kedekatan pada yang kuasa menjadi silsilah penting dalam melakukan antisipasi kebencanaan. Tidak hanya bergantung pada satu, namun meninggalkan faktor lain. Saling berhimpu, menguatkan dan mengokohkan. Layaknya shaff shalat, maka harus berinisiatif mengisi saat ada celah kosong. Tidak perlu menunggu, insyaAllah pada akhirnya jalan-jalan kebaikan akan bertemu dipersimpangan takdir.

Spirit dan moral adalah modal besar yang tidak bisa dibeli, perlu diaktivasi terus menerus dalam kurun waktu tertentu dengan konsistensi. Karena dasarnya hati, maka dia akan berakhir di hati. Mengetuk Arsy, menghadirkan kebaikan serta keberkahan berlipat.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Fraksi PKS DPR Peringati Mosi Integral M. Natsir 3 April 1950:

Mengokohkan Mata Rantai Sejarah Kembalinya Indonesia Dalam Bingkai NKRI

KUTIPAN

Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Webinar Peringatan Mosi Integral M. Natsir 3 April 1950 dengan tema "NKRI Harga Mati", Sabtu (3/4).

Peringatan ini dilaksanakan setiap tahun oleh Fraksi PKS untuk mengenang episode sejarah penting kembalinya Indonesia dalam bingkai NKRI.

Tampil sebagai pembicara Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua BPIP 2018 Yudi Latif, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Adian Husaini.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan Mosi integral Natsir menjadi perhatian khusus bagi Fraksi PKS agar mata rantai sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terputus. Kita tahu bahwa melalui KMB Belanda mencabik-cabik Indonesia menjadi Negara Serikat (RIS).

"Muhammad Natsir sebagai Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen RIS, mengusulkan pembubaran RIS untuk kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini siapapun yang mengaku menegakkan NKRI, mengatakan NKRI harga mati, harus ingat jasa besar Muhammad Natsir," tandas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengatakan Mosi Integral Natsir membuktikan peran tokoh muslim dalam menjaga, menyatukan, dan menyelamatkan Indonesia dari upaya perpecahan.

"Mosi itu juga merupakan bukti komitmen tokoh-tokoh Islam terhadap NKRI bahkan yang melahirkan NKRI itu sendiri. Inilah keteladanan yang diwariskan Pak Natsir kita semua untuk mencintai dan menjaga Indonesia," ujarnya.

Maka, lanjut Jazuli, siapapun yang merusak Indonesia dengan berbagai cara seperti komunisme, sekularisme, liberalisme dan terorisme harus kita halau bersama karena menciderai amanat para pendiri bangsa utamanya Muhammad Natsir.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Muhammad Natsir sebagai Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen RIS, mengusulkan pembubaran RIS untuk kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini siapapun yang mengaku menegakkan NKRI, mengatakan NKRI harga mati, harus ingat jasa besar Muhammad Natsir”

Peringati Mosi Integral Natsir, HNW usulkan 3 April Hari Nasional dan sebagai Bulan NKRI

KUTIPAN

"Kalau ada yang menjadikan bulan Juni ini bulan Pancasila maka tidak salah jika bulan April sebagai bulan NKRI. Ini menjadi semakin kokoh dan kuat hubungan PKS dengan NKRI. Karena M. Natsir adalah sosok yang menghadirkan kembali NKRI" pungkas HNW.

Jakarta (03/04) --- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, semangat PKS memperingati Mosi Integral Mohammad Natsir merupakan upaya menguatkan ingatan bahwa NKRI Harga Mati.

Pria yang akrab disapa HNW ini mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu MPR RI bersama DDII, Persis dan Ormas lainnya menandatangani usulan bahwa tanggal 3 April menjadi Hari Nasional dan Hari NKRI.

"Kalau ada yang menjadikan bulan Juni ini bulan Pancasila maka tidak salah jika bulan April sebagai bulan NKRI. Ini menjadi semakin kokoh dan kuat hubungan PKS dengan NKRI. Karena M. Natsir adalah sosok yang menghadirkan kembali NKRI" pungkas HNW.

HNW menambahkan bahwa hari-hari ini semakin banyak tokoh yang membicarakan Mosi Integral, M. Natsir dan menjadi NKRI.

"Banyak yang kemudian semakin mengingatkan dan membicarakan kembali terkait dengan Mosi Integral ini. Bahkan secara khusus pak Adian yang menulis buku dan disebar ke media sosial. Alhamdulillah apa yang dilakukan PKS ini menyebar kemana-mana", papar HNW.

Problema kita, imbuh HNW, disatu ketika menyebut JAS MERAH atau Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, tapi sejarah menjadi NKRI, sejarah Mosi Integral sering sekali dilupakan.

"Kita bersyukur sekali belakang ada kawan kita pak Ahmad Murjoko yang membuat tesis tentang Mosi Integral. Tapi secara umum ini belum menjadi arus besar," terang HNW dalam peringatan Hari NKRI yang digelar Fraksi PKS DPR RI.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

Problema kita, disatu ketika menyebut JAS MERAH atau Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, tapi sejarah menjadi NKRI, sejarah Mosi Integral sering sekali dilupakan. Kita bersyukur sekali belakang ada kawan kita pak Ahmad Murjoko yang membuat tesis tentang Mosi Integral. Tapi secara umum ini belum menjadi arus besar

Peringatan Mosi Integral Natsir 3 April

Tokoh MUI Serukan Umat Munculkan Natsir-Natsir Baru

KUTIPAN

Menurut Muhyiddin, Mohammad Natsir itu seorang cendekiawan cerdik plus praktisi hebat yang mampu menyelematkan NKRI dengan mosi integral . "Beliau tahu cara yang paling cerdik untuk menggelorakan itu, yakni melalui Kongres Umat Islam yang sudah diselenggarakan sejak zaman sebelum kemerdekaan”

Jakarta (3/4) - Wakil Ketua Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Muhyiddin Junaidi, meminta agar umat Islam serius untuk melahirkan kembali tokoh-tokoh yang sekaliber dengan Mohammad Natsir.

Menurut Muhyiddin, Mohammad Natsir itu seorang cendekiawan cerdik plus praktisi hebat yang mampu menyelematkan NKRI dengan mosi integral . "Beliau tahu cara yang paling cerdik untuk menggelorakan itu, yakni melalui Kongres Umat Islam yang sudah diselenggarakan sejak zaman sebelum kemerdekaan" ujar Muhyiddin Junaidi, dalam acara memperingati Mosi Integral Mosi Integral NKRI yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI, Sabtu (3/4).

Namun, menurut Muhyiddin, umat memiliki tantangan besar untuk melahirkan kembali tokoh seperti Mohammad Natsir/ Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan itu terjadi.

"Pertama, umat ini kurang punya tokoh-tokoh yang berintegritas akibat mereka diserang virus cinta dunia. Lalu, banyak penguasa-penguasa sekarang sudah biasa bertindak zalim" ujar tokoh dari Muhammadiyah tersebut.

Muhyiddin juga menyorot intelektual yang tidak berani melawan kezaliman, dan tipu daya politik yang semakin licik dan tidak bermoral. Belum lagi fanatisme ormas/aliran yang berlebihan hingga keterbelakangan umat di sektor ekonomi hingga sosial.

"Semua itu adalah penyebab kenapa umat belum mampu menghasirkan tokoh-tokoh hebat sekaliber Mohammad Natsir" ujar KH Muhyiddin Junaidi.

K.H. Dr(HC) MUHYIDDIN JUNAIDI
Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama International PP Muhammadiyah.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia

“Umat memiliki tantangan besar untuk melahirkan kembali tokoh seperti Mohammad Natsir/ Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan itu terjadi. Pertama, umat ini kurang punya tokoh-tokoh yang berintegritas akibat mereka diserang virus cinta dunia. Lalu, banyak penguasa-penguasa sekarang sudah biasa bertindak zalim”

Peringatan Mosi Integral Natsir 3 April

Yudi Latif : M. Natsir Pemimpin Muslim dan Nasionalis yang Kuat

KUTIPAN

Menurut Yudi Latif, Mohammad Nasir ini adalah figur yang sangat luar biasa, manusia yang bisa melintasi banyak kategori. Saya jarang melihat orang yang banyak di tempatkan di seluruh sila selain Mohammad Natsir. Mungkin Bung Karno tak bisa di tempatkan di seluruh sila, tapi Mohammad Natsir bisa,

Jakarta (03/04) --- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 2018, Yudi Latif, dalam acara memperingati Mosi Integral M. Natsir yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI mengatakan Mohammad Natsir merupakan figur yang pantas untuk menjadi teladan bagi para pemimpin dan kekuatan politik Islam karena kualitasnya.

"Mohammad Nasir ini adalah figur yang sangat luar biasa, manusia yang bisa melintasi banyak kategori. Saya jarang melihat orang yang banyak di tempatkan di seluruh sila selain Mohammad Natsir. Mungkin Bung Karno tak bisa di tempatkan di seluruh sila, tapi Mohammad Natsir bisa," terangnya.

Mohammad Nasir, lanjut Yudi, merupakan manusia yang bisa melampaui segala kategori dan bisa 'passing over' antara Keislaman dan Kebangsaan.

"Mohammad Natsir ini adalah pemimpin Muslim Partai terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tapi di satu sisi juga beliau merupakan tokoh Nasionalis yang kuat", ungkap Ketua Pusat Studi Islam & Kenegaraan Indonesia ini.

Yudi menegaskan kontribusi Mohammad Natsir dalam konteks menegakkan NKRI ini adalah bagaimana diplomasi yang dilakukannya benar-benar menyatukan bangsa dan negara Indonesia saat itu dimana terjadinya dualisme kepemimpinan.

"Dengan kearifan dan kebijaksanaan Mohammad Natsir itulah menjadi catatan pertama suksesnya Natsir mengembalikan kekuasaan pada Muhammad Hatta dari Syafrudin. Demi kemaslahatan bersama dan cita-cita bangsa Indonesia.", tutup Yudi dalam acara yang rutin digelar tahunan Fraksi PKS DPR RI ini.

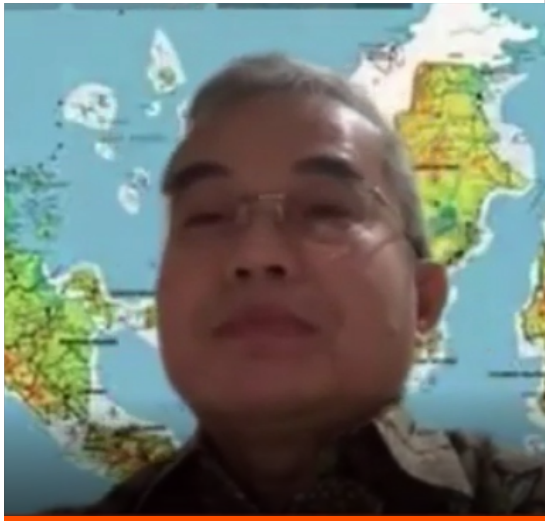

YUDI LATIF, Ph.D
Kepala BPIP 2018 / Ketua Pusat Studi Islam & Kenegaraan Indonesia

"Dengan kearifan dan kebijaksanaan Mohammad Natsir itulah menjadi catatan pertama suksesnya Natsir mengembalikan kekuasaan pada Muhammad Hatta dari Syafrudin. Demi kemaslahatan bersama dan cita-cita bangsa Indonesia"

Peringatan Mosi Integral Natsir 3 April

Ketua Umum DDII: Umat Islam Harus Meneladani M. Natsir

KUTIPAN

Jakarta (3/4) - Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Adian Husaini meminta agar umat Islam untuk menedalani kehiduapan Mohammad Natsir

Menurut Adian, beliau memiliki keteladanan yang luar biasa sehingga mampu melobi tokoh-tokoh nasional maupun negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) agar sepakat untuk bersatu mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kesuksesan mosi integral ini tak lepas dari cara pandang beliau yang integral, sudah melihat keindonesiaan dan keislaman sebagai satu kesatuan. Semua ditunjang oleh integritas akhlak dan kecerdasan intelektual beliau "ujar Adian Husaini dalam acara memperingati Mosi Integral Natsir yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI, Sabtu (3/4/2021).

Menurut Adian, Mohammad Natsir memiliki tradisi intelektual yang panjang. Di usia 30 tahun, beliau mampu menuliskan makalah mengenai pemikiran Imam Ghazali yang sangat ilmiah dan berat untuk dipahami. Beliau juga mampu membantah sekulerisme yang diusung oleh tokoh-tokoh di zaman itu hingga sampai ke akar filosofisnya.

Ditambah lagi, beliau memiliki tiga orang guru hebat yang menghiasi khazanah pemikiran beliau. Ketiga-tiganya ini juga merupakan tokoh pergerakan Islam sejak zaman kolonial.

Mereka adalah Agus Salim, Syaikh Ahmad Surkati dan A. Hassan. Agus Salim sendiri adalah murid dari Syaikh Ahmad Khatib Minangkabawi yang merupakan Imam Besar Masjidil Haram. Sementara itu, Syaikh Ahmad Surkati dan A.Hassan adalah tokoh reformis Islam yang berperan dalam dakwah Islam di zaman kolonial" ujar Adian Husaini.

Selain itu, Adian juga menggariskan integritas moral yang dimiliki oleh Mohammad Natsir. Beliau baginya adalah tokoh yang ikhlas dan tidak mengejar harta maupun popularitas.

"Beliau itu sejak awal ingin mendidik umat, ingin membangun universitas Islam dan beliau melakukan itu tanpa dibayar. Bahkan, beliau menolak mengambil beasiswa ke luar negeri karena ingin terjun langsung untuk mendidik umat tersebut" ujar Adian Husaini.

Menurut Adian, integritas dan kecerdasan intelektual Natsir yang akhirnya membuat tokoh-tokoh RIS percaya dengan beliau. Hanya dalam 2,5 bulan, beliau mampu meyakinkan mereka semua untuk bergabung dengan NKRI.

Terakhir, Adian menyampaikan nasihat Natsir kepada umat Islam agar tidak cinta dunia berlebihan. Menurut Natsir, hal ini lah yang dapat merusak dan menghancurkan umat Islam di Indonesia "Kata beliau, kita akan bernasib seperti di Spanyol dimana umat Islam terusir, kalau kita tidak mampu menyelesaikan ini" ujar Adian Husaini.

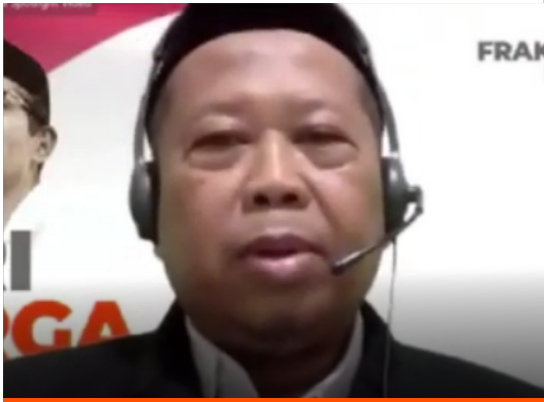

H. ADIAN HUSAINI. Ph.D
Ketua Umum DDII

> “Beliau itu sejak awal ingin mendidik umat, ingin membangun universitas Islam dan beliau melakukan itu tanpa dibayar. Bahkan, beliau menolak mengambil beasiswa ke luar negeri karena ingin terjun langsung untuk mendidik umat tersebut”

PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

رمضان 1442 H

Semangat **MELAYANI**
Semangat **RAMADHAN**

MARHABAN YA RAMADHAN

Mari Sambut Ramadhan dengan Spirit Melayani Sesama

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

fraksi.pks.id | Fraksi PKS DPR RI | fraksipks.pks | @fpkedprri | PKS TV DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN

Fraksi PKS DPR Kembali Potong Gaji untuk Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Flores Timur NTT dan Bima NTB

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Pertolongan dan bantuan kita atas nama kemanusiaan tanpa melihat ras, suku, dan agama. Tapi yang pasti kita saudara satu bangsa harus menunjukkan solidaritas nasional agar saudara-saudara kita di sana menjadi ringan bebannya"

Fraksi PKS Mengutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

KUTIPAN

Fraksi PKS mengutuk keras aksi bom bunuh diri ini. Pelakunya jahat dan keji. Kita tidak boleh mentolelir tindakan biadab ini. Dan jika tujuannya teror maka Indonesia tidak boleh kalah dan menyerah dengan aksi terorisme seperti ini

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengutuk keras aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar Sulsel (28/3). Menurutnya tindakan tersebut sangat biadab dan mengoyak kedamaian bangsa Indonesia. Pelakunya tidak punya perikemanusiaan dan jelas tidak beragama.

Menurut Jazuli Juwaini, aksi bom bunuh diri ini, apapupun motifnya, siapapun pelakunya tidak dibenarkan oleh agama manapun dan menciderai prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Kita semua mengutuk dan melawan dengan keras dan tegas.

"Fraksi PKS mengutuk keras aksi bom bunuh diri ini. Pelakunya jahat dan keji. Kita tidak boleh mentolelir tindakan biadab ini. Dan jika tujuannya teror maka Indonesia tidak boleh kalah dan menyerah dengan aksi terorisme seperti ini," tegas Jazuli.

Jazuli Juwaini menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut serta belasungkawa kepada korban terdampak ledakan bom. Secara khusus, kepada saudara-saudara umat kristiani Gereja Katedral Makassar, Jazuli menyampaikan keprihatinan dan perasaan duka.

"Kita merasakan duka dan kesedihan yang sama dengan umat kristiani di Makassar. Hati kami bersama anda semua. Semoga situasi kembali kondusif dan umat kristiani dapat kembali beribadah dengan tenang," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menyerahkan dan mempercayakan pengusutan kasus ini kepada aparat keamanan. Menurutnya, semakin cepat diungkap pelaku dan aktor intelektualnya semakin baik untuk kepentingan publik.

"Kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas motif dan aktornya. Tegakkan hukum secara tegas dan adil. Agar masyarakat tenang dan suasana kembali kondusif. Keselamatan warga adalah nomor satu," pungkas Jazuli.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kita merasakan duka dan kesedihan yang sama dengan umat kristiani di Makassar. Hati kami bersama anda semua. Semoga situasi kembali kondusif dan umat kristiani dapat kembali beribadah dengan tenang"

Soal Teror Bom di Makassar, Anggota FPKS: Ada Agenda Setting?

KUTIPAN

Jakarta (29/03) --- Anggota Komisi Agama DPR RI, Bukhori Yusuf, menyampaikan keprihatinan terkait perstiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.

Bukhori pun meminta kepada setiap pihak untuk tidak mengaitkan insiden teror bom ini dengan agama manapun.

"Saya mengutuk setiap pihak yang terlibat dalam aksi ini. Saya tegaskan, teror ini tidak ada hubungannya dengan ajaran agama tertentu, terutama Islam. Terorisme adalah musuh semua agama," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Anggota Baleg ini menyerukan kepada setiap pihak untuk tidak menaruh syak wasangka pada umat agama lain supaya tidak memperkeruh suasana dan tidak terjebak dalam rencana picik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berada di balik insiden ini.

"Pasalnya, saya mencurigai teror bom ini sebagai bagian dari agenda setting untuk merusak kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun selama ini," ujarnya.

Bukhori menduga ada motif lain dari serangan bom ini, yakni untuk menciptakan citra negatif bagi agama maupun pemeluk agama tertentu.

"Ada pihak-pihak yang tidak menghendaki adanya kerukunan antar dan intra umat beragama. Sementara di sisi lain, mereka tidak senang dengan sumbangsih positif agama yang memiliki dampak multidimensional bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini," imbuhnya.

Alhasil, demikian Bukhori meneruskan, mereka menggunakan cara tidak beradab untuk menebar ketakutan dan memunculkan rasa curiga di tengah masyarakat terhadap sesamanya.

"Mereka hendak memberturkan sesama umat beragama. Di samping itu, tujuan licik mereka yakni memelihara stigma terhadap agama tertentu. Karena itu, saya menduga ini sebagai tujuan utama dari teror itu," sambungnya.

Anggota yang pernah duduk di Komisi Hukum ini mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk cermat dan mampu mengusut dalang dibalik teror ini.

"Pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada aktor di lapangan. Seringkali pelbagai tindakan teror seperti ini polisi tidak berhasil menemukan aktor kuncinya. Imbasnya, umat beragama, khususnya umat Islam acapkali dirugikan akibat stigma tertentu," tegasnya.

Karenanya, lanjut politisi dapil Jateng 1 ini, aparat harus mampu mengungkap alasan dan motif sebenarnya para teroris itu dalam melakukan tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut.

"Jangan sampai hanya berhenti pada tindakan pelaku yang seakan akan menyudutkan ajaran agama tertentu," pungkasnya.

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada aktor di lapangan. Seringkali pelbagai tindakan teror seperti ini polisi tidak berhasil menemukan aktor kuncinya. Imbasnya, umat beragama, khususnya umat Islam acapkali dirugikan akibat stigma tertentu"

Terkait Bom di Depan Katedral Makassar,

HNW Nilai RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Kian Urgent

KUTIPAN

Jakarta (29/03) --- Anggota Komisi VIII DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid kembali mengutuk keras berkelanjutannya kejahatan terhadap rumah Ibadah, seperti pengeboman di depan Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pria yang akrab disapa HNW ini juga mendesak agar RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah sebagai program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021, agar segera dibahas dan disahkan.

"Apalagi salah satu tujuan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama adalah untuk melindungi rumah-rumah ibadah dari seluruh Agama yang diakui di Indonesia," terang HNW.

HNW mengatakan bahwa pengeboman di depan Gereja Katedral itu merupakan rangkaian teror terhadap rumah ibadah yang terus berlangsung dalam dua tahun terakhir.

Sebelumnya, imbuh HNW, sudah terjadi vandalisme dan penyerangan terhadap masjid dan jemaahnya di Dago (Bandung), Tangerang, Padang, Pondok Labu (Jakarta Selatan) dan lain sebagainya. Ditambah lagi penganiayaan terhadap Imam dan Juru Dakwah di dalam Masjid, seperti yang dialami oleh Imam Masjid di Pekanbaru, Imam Masjid di Depok, Imam Masjid/Musholla di Temanggung, Muadzin di Garut dan penusukan terhadap Syeikh Ali Jaber di masjid Falahuddin BandarLampung.

"Saya mengutuk pengeboman di depan Katedral di Makassar tersebut, dan juga mengutuk berlanjutnya kejahatan terhadap rumah-rumah ibadah dari berbagai Agama sehingga menjadi seolah-olah rangkaian kasus-kasus kejahatan terhadap rumah-rumah Ibadah. Padahal di negeri Pancasila yang menjadikan kebebasan beragama dan melaksanakan ajaran Agama menjadi bagian dari HAM yang konstitusional dan diakui serta dilindungi oleh UUD NRI 1945, maka sudah seharusnya bila Pemerintah menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi Rakyat untuk mempraktekkan HAM-nya dan merasa aman dan bebas beribadah dan menjalankan ajaran agamanya," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (29/03).

HNW juga mempertanyakan lembaga-lembaga, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang seharusnya berperan mencegah dan menghalangi agar kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi berulang kali.

"Besaran anggaran untuk BIN dan BNPT terus meningkat, tapi teror terhadap rumah ibadah masih terus terjadi," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"DPR dan Pemerintah telah sepakat memasukan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama ke dalam Prolegnas Prioritas 2021, maka terus berlanjutnya kejahatan terhadap simbol-simbol Agama seperti rumah-rumah ibadah itu, seharusnya menyadarkan DPR dan Pemerintah untuk segera membahas draft RUU tersebut dan untuk segera disahkan juga"

Rusak Keharmonisan Umat Beragama

Komisi III Harap Polisi Ungkap Semua Pihak Terkait Bom Bunuh Diri Makassar

KUTIPAN

"Itu perusak harmonis umat antar agama dan toleransi, ini kan targetnya tempat-tempat ibadah terus seperti ada adu domba serta ini cara-cara yang kurang manusiawi dan ini menjadi provokasi," ucap Dimyati begitu dirinya disapa saat dihubungi, Senin (29/3/2021).

Jakarta (29/03) --- Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PKS Achmad Dimyati menilai, aksi terorisme berupa serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada, Minggu, (28/3/2021) dapat merusak keharmonisan antar agama.

"Itu perusak harmonis umat antar agama dan toleransi, ini kan targetnya tempat-tempat ibadah terus seperti ada adu domba serta ini cara-cara yang kurang manusiawi dan ini menjadi provokasi," ucap Dimyati begitu dirinya disapa saat dihubungi, Senin (29/3/2021).

Menurutnya, aparat kepolisian harus segera mendalami dan mencari pihak-pihak yang terlibat dibalik kejadian tersebut.

"Dalami modusnya apa itu, kita berharap polisi segera menemukan semua yang terlibat dalam itu semua, Doenpleger (yang nyuruh), Dader (pelaku), Mededader (yang turut serta), Medepletigheid (aktor intelektual), dalam kasus pengeboman di Gereja Katedral kemaren yang harus diungkap oleh polisi," katanya.

Ia menyampaikan, saat ini teknologi sudah canggih sehingga dapat mendeteksi hal tersebut. Akan tetapi, ia juga berharap, agar tidak ada provokasi kepada umat agama.

"Harus dilihat sehingga jangan sampai nanti salah tuduh, maka itu harus di kaji lebih mendalam dan cari tahu kenapa harus tempat ibadah," imbuhnya.

Dimyati menuturkan, bahwa Indonesia merupakan negera yang sangat kaya dan memiliki keberagaman baik dari sisi budaya dan agama.

Oleh sebab itu, lanjut Dimiyati, seharusnya dapat dijaga serta bagaimana dapat menembarkan kebaikan.

"Kita berharap semua baik Islam, Hindu, Budha, Protestan, Katolik dan Konghucu dapat saling merangkul serta saling menjaga kerukunan dan kebersamaan membangun Indonesia. Karena Indonesia dapat dibangun dengan bersama-sama," pungkasnya.

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH
Anggota Komisi III DPR RI

"Dalami modusnya apa itu, kita berharap polisi segera menemukan semua yang terlibat dalam itu semua, Doenpleger (yang nyuruh), Dader (pelaku), Mededader (yang turut serta), Medepletigheid (aktor intelektual), dalam kasus pengeboman di Gereja Katedral kemaren yang harus diungkap oleh polisi"

Fraksi PKS DPR RI Mengucapkan Selamat
Menunaikan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan 1442 H

DURASI PUASA SETIAP NEGARA DI DUNIA

Bulan Ramadan telah datang, umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa. Karena letak geografis dan zona waktu setiap negara yang berbeda, hal tersebut berpengaruh pada waktu salat dan puasa yang berbeda pula.

* Lama Durasi = Jam

- Sumber Data : Tim Riset FPKS DPR RI
- Grafis : Aditya Angga

Wacana Presiden Tiga Periode

Anggota FPKS: Sebuah Ironi! Demokrasi yang Lama Dibangun Justru Tertahan

KUTIPAN

Jakarta (29/03) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengungkapkan keprihatinannya mengenai keberlangsungan demokrasi di negara Indonesia

yang dinilai terancam dan menunjukkan penurunan kualitas melalui akun pribadi Twitter-nya.

"Bismillah, isu jabatan presiden 3 periode yang sempat ramai memberikan peringatan sampai pelajaran berharga untuk bangsa kita. Jika demokrasi ingin terus berkembang mestinya mempercepat sirkulasi elit. Sulit negeri ini tumbuh secara beradab jika fasilitas untuk mempercepat sirkulasi elit justru dihambat," ujarnya.

Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta I itu membeberkan bahwa kasus kudeta Partai Demokrat yang belum lama ini terjadi bisa dijadikan contoh bahwa oligarki tidak lagi bermain elegan dan lembut, melainkan melalui berbagai peraturan dan cara-cara yang terselubung. Mardani menyebut, kelompok tersebut sudah mulai menampilkan sikap-sikap premanismenya dan mendegradasi nilai-nilai penting demokrasi.

"Kita perlu lebih waspada lagi, pandangan saya, premanisme ini akan terus berjalan, dan bukan tidak mungkin kita akan menghadapi hari-hari yang lebih berat. Ketika indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi korupsi kita turun, dan berbagai hal lainnya yang membuat kita harus lebih bersiap," tegasnya.

Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup tersebut menambahkan, isu seperti ini merupakan ironi besar karena demokrasi yang sudah lama dibangun justru tertahan. Seakan ada dinding tinggi dan tebal yang memisahkan rakyat dan oligarki (elit). Ia melanjutkan, aspek soft power seperti ini yang tidak dibaca, sehingga memanfaatkan kondisi multi partai yang ada di negeri ini.

"Antitesa dengan Presiden Soeharto yang ketika itu cenderung partai tunggal, meskipun saat itu ada Golkar, PPP dan PDIP. Jika dikaitkan dengan geopolitik, kita perlu mengakui bahwa apa yang selama ini dikembangkan dalam design demokrasi belum berbasis kepada akar dukungan politik rakyat yang mengakar di dalam ke-Indonesiaan kita," terangnya.

Mardani menutup cuitannya dengan menjelaskan bahwa starting point ini mesti kembali ke sana terlebih dahulu sebagai tolok ukur untuk merekonstruksinya. Lebih lanjut, menurutnya arahnya harus menuju konsensus nasional untuk mengubah tataran ini, sekaligus menjadi dasar mengapa geopolitik perlu menjadi input dalam menyusun rekonstruksi nasional.

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

isu seperti ini merupakan ironi besar karena demokrasi yang sudah lama dibangun justru tertahan. Seakan ada dinding tinggi dan tebal yang memisahkan rakyat dan oligarki (elit). Ia melanjutkan, aspek soft power seperti ini yang tidak dibaca, sehingga memanfaatkan kondisi multi partai yang ada di negeri ini.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Anggota FPKS Soroti Dampak Buruk Legitimasi Impor Pangan Pada UU Cipta Kerja

KUTIPAN

Jakarta (31/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menyoroti kebijakan legitimasi impor pangan yang tertuang dalam UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

yang telah menjadi salah satu sumber kekisruhan persoalan pangan dalam negeri terutama pada regulasi ketersediaan pangan.

Pasalnya, kata Saadiah, Impor merupakan salah satu sumber pangan nasional yang disejajarkan dengan produksi pangan dalam negeri.

"Ini sudah awal yang suram bagi bangsa kita dalam pengelolaan pangan nasional, mulai dari produksi, distribusi hingga tata niaganya. Perlu evaluasi besar-besaran pada persoalan tata kelola pangan ini agar tidak terlalu berlarut yang akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari", tutur Saadiah.

Politisi PKS ini secara terbuka mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ketahan pangan nasional melalui program Food Estate.

"Saya mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah dan jajarannya agar melihat persoalan pangan ini secara luas. salah satu titik paling krusial adalah kebijakan pemerintah mulai dari regulasi hingga pelaksanaan di lapangan," ungkapnya.

Legislator asal Maluku ini mencontohkan beberapa dampak yang mulai terlihat akibat di sahkannya UU Cipta kerja berkaitan persoalan impor pangan.

Ekses dari UU tersebut, kata Saadiah, yang sudah terlihat jelas antara lain, dimulai dari rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras pada tahun 2021, impor 3 juta ton garam, impor 500.000 ekor sapi/kerbau, impor jahe bahkan impor ikan setiap tahun mengalami peningkatan.

"Saya memperhatikan kok ada yang salah dari perencanaan pemerintah terkait pangan, dimana perencanaan pemerintah seperti berdiri pada salah satu sudut dan realitas berada di sudut lain", ujar Saadiah.

Aktivis Perempuan PKS ini menyayangkan Koordinasi antar kementrian dan lembaga masih terlihat amburadul.

Bahkan menurut Saadiah, Presiden Jokowi tampak memperoleh data yang keliru terkait impor beras yang menurut beliau Indonesia tidak pernah impor beras selama 3 tahun terakhir padahal faktanya merujuk dari data BPS impor beras tahun 2018 mencapai 2,25 Juta Ton, tahun 2019 sebesar 445.000 ton dan tahun 2020 sebesar 365.000.

"Yang paling ironi menurutnya sisa impor tahun 2018 yang saat ini masih tersisa di gudang bulog dan ini berpotensi menjadi barang yang kadaluarsa untuk di konsumsi manusia," tutup Saadiah.

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

"Ekses dari UU tersebut yang sudah terlihat jelas antara lain, dimulai dari rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras pada tahun 2021, impor 3 juta ton garam, impor 500.000 ekor sapi/kerbau, impor jahe bahkan impor ikan setiap tahun mengalami peningkatan. Saya memperhatikan kok ada yang salah dari perencanaan pemerintah terkait pangan, dimana perencanaan pemerintah seperti berdiri pada salah satu sudut dan realitas berada di sudut yang lain"

Legislator PKS Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

KUTIPAN

Jakarta (01/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun,

penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air.

Pasalnya, kata Johan, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK (organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang masuk ke Indonesia yang berpotensi membawa bakteri dan penyakit pertanian masuk ke Indonesia.

"Atas kejadian tersebut, Pemerintah menyikapinya dengan melakukan penolakan namun tidak direspon oleh importir sehingga dilakukan pemusnahan/pembakaran dengan suhu tinggi pada jahe impor tersebut," ungkapnya.

"Saya berharap pemerintah berani memberikan sanksi yang tegas kepada semua importir yang melanggar aturan ketentuan bahkan bila perlu mencabut izin perusahaan tersebut jika tidak mengindahkan ketentuan tentang impor", tegas Johan.

Anggota legislative dari NTB ini menilai tindakan pembakaran produk impor jahe telah menunjukkan lemahnya system karantina dan tata Kelola produk impor yang masuk ke Indonesia.

"Hal ini harus diperbaiki dari hulu sampai ke hilir jangan sampai negara kita menjadi sasaran masuknya bibit penyakit dan berbagai jenis OPTK yang bisa terbawa melalui tanah dari negara lain", ungkap Johan.

Johan menguraikan berdasarkan data BPS, Indonesia termasuk negara yang paling banyak melakukan impor jahe, baik dalam bentuk utuh, maupun dalam bentuk bubuk.

"Tahun 2020 lalu total impor jahe sebanyak 19.252 ton dengan rincian 19.204 ton dalam bentuk jahe utuh dan 48,39 ton dalam bentuk jahe bubuk," papar Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini menyatakan jika Importasi Jahe yang tidak memenuhi persyaratan dari Kementan namun tetap lolos masuk ke wilayah Indonesia.

"Ini merupakan bukti kasus telah terjadi praktek mafia impor hortikultura di tanah air secara sistematis maka hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah agar tidak kalah dengan mafia impor demi kepentingan kedaulatan pangan nasional," pungkasnya.

Untuk itu, Johan mengusulkan agar DPR segera membentuk pansus impor pangan, karena begitu kompleksnya dan sistematisnya kegiatan impor pangan yang telah merugikan petani dan

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

"Jika Importasi Jahe yang tidak memenuhi persyaratan dari Kementan namun tetap lolos masuk ke wilayah Indonesia.Ini merupakan bukti kasus telah terjadi praktek mafia impor hortikultura di tanah air secara sistematis maka hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah agar tidak kalah dengan mafia impor demi kepentingan kedaulatan pangan nasional

Terkait Rencana Impor Jahe, Anggota FPKS: Ada yang salah Pengelolaan Hortikultura di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (01/04) --- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyoroti pemusnahan Jahe Impor sebanyak 108 Ton oleh Badan Karantina yang kemudian menjadi pemicu polemik di masyarakat.

hingga ada pemanggilan beberapa Importir jahe di RDPU dan beberapa eselon 1 Kementerian Pertanian di RDP DPR RI.

Menurut pria yang disapa Akmal ini, Pemusnahan 108 Ton Jahe yang terduga terkontaminasi organisme berbahaya ini mendapat perhatian, karena menimbulkan banyak sekali pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab pemerintah, sehingga pertanian dan pangan nasional dikemudian hari tidak menemui hal serupa atau minimal bila terjadi hal serupa dapat ditangani secara cepat.

"Fraksi PKS mengapresiasi Badan Karantina yang bertindak tegas memusnahakan 108 Ton Jahe yang terduga terkontaminasi organisme berbahaya. Tetapi tindakan ini mesti disadari bahwa terjadi keterlambatan penanganan. Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan untuk perencanaan tahun 2022, mesti dilakukan secara matang agar setiap angka alokasi anggaran negara berujung pada produktivitas yang berkualitas dan terukur", kata Akmal.

Politisi PKS ini mengutip amanat UU Perdagangan Pasal 50 ayat (2) huruf c, Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Data yang Akmal dapat tersebar di berbagai platform, Jahe merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor yang memiliki peluang bisnis yang sangat potensial.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2018, produksi utama tanaman biofarmaka Indonesia adalah jahe, sebesar 216.587 ton. Bahkan ekspor tertinggi tanaman biofarma di Indonesia juga dipegang oleh jahe, dengan volume ekspor sebesar 23.551,9 ton atau senilai US$13,53 juta.

"Kita ini kan negara yang sangat mumpuni dari segi ketersediaan lahan, dukungan iklim cuaca, sumber air cukup, tapi agak aneh pengelolaan pertanian kita termasuk hortikultura kok terus ada celah impornya. Bahkan Jahe yang merupakan produk yang dapat dikatakan khas dapat diproduksi di tanah air kok masih impor juga. Selama 2020, total impor jahe utuh maupun yang telah dihancurkan atau bubuk mencapai 19.252 ton atau senilai US$ 16,92 juta. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai Rp 243,3 miliar (kurs Rp 14.400 per dolar AS)", sesal Akmal.

Lebih lanjut Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mendorong pemerintah mengembalikan kejayaan Jahe dalam negeri sehingga mampu ekspor kembali kepada 26 Negara seperti halnya yang telah terjadi pada tahun 2019.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

> "Kita ini kan negara yang sangat mumpuni dari segi ketersediaan lahan, dukungan iklim cuaca, sumber air cukup, tapi agak aneh pengelolaan pertanian kita termasuk hortikultura kok terus ada celah impornya"

Politisi PKS Minta Pemerintah Perjelas Aturan Soal Ekspor Benih Lobster

KUTIPAN

Jakarta (01/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi penjelasan terkait pencegahan ekspor benih lobster.

Pasalnya, kata Slamet, pencegahan ekspor benih lobster ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan karena selama ini penangkapan benih lobster telah menjadi mata pencaharian mereka.

"Jadi perlu diperjelas bagaimana tindak lanjut pemerintah terhadap pencegahan atau larangan ini," kata Slamet saat mengikuti rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis, (01/04).

Legislator asal Sukabumi ini mengungkapkan bahwa sepertiga dari jumlah ekspor benih lobster Indonesia berasal dari Kabupaten Sukabumi.

Slamet meminta pemerintah tetap menjalankan amanat UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

"Bagaimana Pemerintah melindungi dan memberdayakan nelayan. Karena secara kesempatan, nelayan ini masih bisa menangkap, tapi aturan tidak memungkinkan," jelasnya.

"Karena saat ini mata pencaharian para nelayan adalah dengan mengandalkan menangkap benih lobster," pungkasnya.

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

“Pencegahan ekspor benih lobster ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan karena selama ini penangkapan benih lobster telah menjadi mata pencaharian mereka. Jadi perlu diperjelas bagaimana tindak lanjut pemerintah terhadap pencegahan atau larangan.”

STOP IMPOR JAHE!

BAWA HAMA, RUGIKAN PETANI dan NEGARA

Badan karantina Kementan melakukan pemeriksaan fisik pada jahe impor terdapat cemaran tanah dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) berupa nematoda yang berpotensi membawa bakteri dan penyakit pertanian ke Indonesia.

PKS meminta Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada semua importir yang melanggar aturan, bila perlu mencabut izin jika tidak mengindahkan ketentuan.

- Volume (kg) impor Jahe tiap tahun

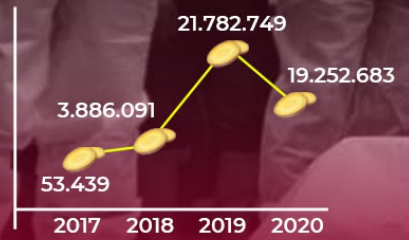

- Nilai (US $) impor Jahe tiap tahun

H. Johan Rosihan, S.T.
(Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS)

- Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, produksi jahe Tanah Air **sudah mencukupi** kebutuhan nasional.

- Estimasi Kebutuhan Jahe
  142.110 Ton - **149.652** Ton

- Produksi Jahe
  2019 — 174.000 Ton
  2020 — 183.000 Ton

Sumber foto (background) : Kompas.com

- Sumber Data : Badan Pusat Statistik
- Grafis : Aditya Angga

Aleg PKS Beri Warning Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

KUTIPAN

Jakarta (05/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan panjang 142,3 kilometer yang pemenang proyeknya telah diumumkan pada bulan Agustus 2015.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI ini, sebelumnya baik China dan Jepang mengatakan kereta mereka mampu menempuh Jakarta-Bandung dalam waktu 36 menit.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US$6,2 miliar, 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun yang akan dibayarkan menggunakan APBN.

Sedangkan China, imbuhnya, menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar US$5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China (40%=Rp35.1 Trilyun) dan 60 persen kepemilikan lokal (60%=Rp46.8 Trilyun), yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai penugasan dari Pemerintah.

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun.

Konsorsium BUMN Indonesia sendiri, membentuk perusahaan dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari PT Wijaya Karya (kepemilikan Saham 38%), PT Kereta Api Indonesia (kepemilikan Saham 25%), PT Jasa Marga (kepemilikan Saham 12%), dan PT Perkebunan Nasional VIII (kepemilikan diwakili oleh China Railway International Co. Ltd itu. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (kepemilikan Saham 60%) dan konsorsium Cina (kepemilikan saham 40%) membentuk PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Nantinya, tarif kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar Rp 200.000 per penumpang dibuat berdasarkan asumsi jumlah penumpang mencapai 44.000 per hari pada tahun pertama dan meningkat menjadi 68.000 penumpang pada 2030, selanjutnya 148.000 penumpang pada 2050.

Sementara itu, berdasarkan datanya, total ada 145.518 orang yang melintas Jakarta-Bandung per hari, 127.133 diantaranya menggunakan mobil pribadi, hanya 2.000-2.500 yang menggunakan kereta api Agro Parahyangan.

Selain itu, tercatat sebanyak 13.000-14.000 menggunakan travel bus kecil, dan penumpang bus besar hanya kurang dari 1.000. Dari hitungan itu saja, target penumpang kereta cepat yang 44.000 per hari agak mustahil tercapai.

Berdasarkan penelitian, memperkirakan hanya sekitar 25% dari 20.000 penumpang angkutan umum yang mau pindah ke kereta cepat. Sedangkan jumlah penumpang kereta api cepat ini akan sangat mempengaruhi pengembalian investasi yang mencapai 5,5 miliar USD atau Rp 78 triliun.

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T
Anggota Komisi V DPR RI

“FPKS meminta Pemerintah lebih berhati-hati dalam merencanakan sebuah proyek raksasa lainnya, seperti misalnya rencana pemindahan Ibukota Negara. Sebab pengalaman pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini memperlihatkan ketergesa-gesaan dalam memutuskan proyek dapat mengakibatkan beban keuangan yang besar pada konsorsium BUMN yang pada akhirnya berpotensi membebani keuangan negara.

Menggunakan perhitungan dasar dengan asumsi variabel semua dianggap tetap pembiayaan proyek kereta cepat dengan menggunakan pinjaman sebesar US$4,12 miliar, atau 75 persen dari nilai investasi sebesar US$5,5 miliar. Sebanyak US$ 2,59 miliar atau 63 persen dari utang, diberikan pihak China ke KCIC dalam denominasi dolar Amerika dengan bunga 2 persen per tahun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Sebut Pengembangan Bandara Internasional Lombok Dukung KEK Mandalika

KUTIPAN

Tasikmalaya (03/04) --- Jelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika Oktober mendatang, PT Angkasa Pura I melakukan sejumlah peningkatan fasilitas bandara Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Lombok.

Anggota DPR RI Komisi V, Toriq Hidayat mengkofirmasi bahwa hingga saat ini, terdapat 4 proyek pengembangan bandara yang tengah dilakukan Angkasa Pura I dan ditargetkan selesai di tahun 2021.

"Proyek pengembangan bandara yang tengah dilakukan Angkasa Pura I untuk mendukung konektivitas udara di Tanah Air. 4 proyek yang dimaksud adalah pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sam Ratulangi Manado dan Bandara di Lombok," ungkap politisi PKS.

Khusus Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Lombok, sebutnya pengembangan dilakukan untuk mendukung status kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika sebagai 'top destination' yang diharapkan mampu memberikan yang terbaik, terlebih dalam membangun destinasi yang berkualitas.

"KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor Pariwisata di NTB. Saat beroperasi penuh di tahun 2025, KEK ini diperkirakan akan menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara per tahun," ujar Toriq.

Untuk mendukung hal tersebut, ia menyebutkan PT Angkasa Pura I melakukan sejumlah peningkatan fasilitas bandara, mulai dari luas landasan pacu hingga daya tampung terminal, Daya tampung terminal juga ditingkatan

"Diharapkan bandara ini bisa didarati pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 777 dan pesawat kargo peserta MotoGP. Serta dapat menampung penumpang yang semula 3,25 juta orang per tahun menjadi 7 juta penumpang per tahun," imbuh Toriq.

Menurutnya dibalik Peluang pasti ada tantangan. Diantara tantangan yang harus dihadapi KEK Mandalika yakni belum terbangunnya sinergi antara KEK Mandalika dan kawasan sekitar, belum ada branding produk unggulan 'mandalika', pendidikan vocational yang memenuhi kebutuhan sektor pariwisata.

"Saya berharap pelaksanaan rapat koordinasi karena antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat Mandalika harus terus ditingkatkan agar pembangunan yang dilakukan akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat," tutup Toriq.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

"Saya berharap pelaksanaan rapat koordinasi karena antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat Mandalika harus terus ditingkatkan agar pembangunan yang dilakukan akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat"

Polemik Impor Beras

Politisi PKS: Coba Dilihat Datanya!

KUTIPAN

Jakarta (29/03) --- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa sudah hampir 3 tahun Indonesia tidak melakukan impor beras.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika memberikan keterangan seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat (26/3/2021).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Rafli Kande meminta Pemerintah untuk melihat kembali data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Coba dilihat datanya. Kita punya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan data di Indonesia, Jokowi bicara seperti itu pakai data siapa? Jangan sampai antar Kementerian dan Lembaga saling melempar tanggung jawab terkait data impor ini. Jokowi harus dapat memastikan sinkronisasi data antar Kementerian dan Lembaga terkait, agar kebijakan yang diambil bisa tepat," papar Rafli.

"Jika kita lihat data yang dipublikasikan oleh BPS, tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2019 Indonesia melakukan impor beras sebanyak 305.274,6 ton di tahun 2017, 2.253.824,5 ton di tahun 2018, dan 444.508, 7 ton di tahun 2019.", imbuh Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh I itu.

Rafli mengatakan jangan-jangan penyataan Jokowi itu untuk meloloskan rencana Pemerintah melakukan impor beras tahun ini.

"Padahal menurut BPS produksi beras periode Januari-April tahun ini diprediksi akan mencapai 14,54 juta ton, atau meningkat 26,84% dibandingkan produksi beras pada Januari-April 2020. Tahun ini diperkirakan produksi beras kita lebih dari cukup, mengingat Indonesia membutuhkan sekitar 2,5 juta ton beras per bulan sementara itu proyeksi produksi beras per bulan mencapai rata-rata sebesar 3,63 juta ton," urai Rafli.

Jika melihat data BPS, sebutnya, produksi beras selama 3 tahun terakhir diperkirakan mencapai 59.200.533,72 ton di tahun 2017, 54.604.033,34 ton di tahun 2018, dan 54.649.202,24 ton di tahun 2019.

"Sementara itu perkiraan jumlah konsumsi berdasarkan data BPS sebesar 29.130.000 ton di tahun 2017, 29.570.000 ton di tahun 2018, dan 22.280.000 ton di tahun 2019", tambah Rafli.

Polemik impor beras ini, lanjutnya, terlihat seperti tidak ada koordinasi antar Kementerian atau Lembaga terkait kepada Presiden, sehingga ketika Jokowi menyampaikan data dari satu Kementerian atau Lembaga ternyata berbeda data dengan Kementerian atau Lembaga lainnya.

"Seharusnya sebelum bicara apalagi mengambil keputusan terkait impor yang berdampak pada rakyat, Jokowi terlebih dahulu mengumpulkan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengambil keputusan", tambah Rafli.

Mengingat menurut Permendag No 1 tahun 2018 impor beras, kata Rafli, bukan hanya dapat dilakukan oleh Bulog saja, jangan sampai kebijakan pemerintah yang diambil tanpa adanya koordinasi yang baik malah merugikan rakyat.

RAFLI
Anggota Komisi VI DPR RI

“Polemik impor beras ini, terlihat seperti tidak ada koordinasi antar Kementerian atau Lembaga terkait kepada Presiden, sehingga ketika Jokowi menyampaikan data dari satu Kementerian atau Lembaga ternyata berbeda data dengan Kementerian atau Lembaga lainnya..”

Legislator PKS Minta Pemerintah Tak Berbisnis Vaksin dan Fokus Pada Efikasi

KUTIPAN

Jakarta (30/03) --- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Bio Farma, Kimia Farma Dan Indo Farma

meminta kepada Perusahaan plat Merah ini agar tidak mengedapankan bisnis vaksin kepada rakyat Indonesia untuk mempercepat penanggulangan wabah covid-19.

Pemerintah telah merancang peta jalan 'Road Map' pemberian vaksin Covid-19. Dimana masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.

"Saya meminta agar pemerintah dan seluruh instrumen pengendali covid-19 termasuk BUMN Farmasi untuk fokus pada efikasi vaksin sinovac, vaksin nusantara dan vaksin gotong royong. Dan yang paling penting adalah negara jangan sampai berbisnis vaksin ini dimana rakyat Indonesia sebagai pasarnya", ujar Nevi.

Nevi mengatakan, bahwa tujuan yang sudah disepakati bersama pada program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian warga karena pandemi Covid-19 dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi seperti lansia, petugas layanan publik, dan tenaga kesehatan.

Politisi PKS ini mempertanyakan, apakah Pemerintah dan Holding BUMN farmasi sudah membangun sistem pendataan, distribusi, pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi yang benar bagi warga Indonesia secara keseluruhan ? Sistem ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik dan benar.

"Saya masih belum melihat bahwa pemerintah hingga saat ini memberi kejelasan terkait status penerima vaksin gotong royong. Bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait rencana vaksin Gotong Royong harus jelas dulu. Jika pemberian vaksin gotong royong hanya ditujukan kepada karyawan, maka seharusnya karyawan menerima vaksin secara gratis dari perusahaannya. Lantas bagaimana dengan keluarganya? Dengan program ini, karyawan sudah dapat bekerja secara penuh dengan tetap menggunakan protokol kesehatan di tempat kerja. Namun harus ada kejelasan dulu terkait supply-nya, pembiayaannya, dan targetnya", kata Nevi mempertanyakan.

Legislator asal Sumbar ini meminta agar memastikan program Vaksinasi dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan karena rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar program vaksinasi nasional berjalan dengan sukses, sehingga pandemi covid-19 dapat segera berakhir.

"Saya berharap pada tata kelola vaksin ini tidak ada sedikitpun konflik interest dari berbagai pihak. Semakin kecil penyelewengan proses pengelolaan vaksin ini, akan semakin besar harapan pandemi covid-19 ini teratasi di negara Indonesia", tutup Nevi Zuairina.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

> “Saya meminta agar pemerintah dan seluruh instrumen pengendali covid-19 termasuk BUMN Farmasi untuk fokus pada efikasi vaksin sinovac, vaksin nusantara dan vaksin gotong royong. Dan yang paling penting adalah negara jangan sampai berbisnis vaksin ini dimana rakyat Indonesia sebagai pasarnya”

Kilang Balongan Terbakar

Legislator PKS Minta Pertamina Amankan Pasokan BBM

KUTIPAN

Jakarta (29/03) --- Terbakarnya kilang minyak Balongan milik Pertamina di Indramayu dikhawatirkan mengganggu pasokan bahan bakar minyak (BBM), terutama di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang selama ini dipasok dari kilang minyak tersebut.

Terlebih saat ini akan memasuki bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menanggapi terbakarnya aset strategis milik Pertamina tersebut.

"Saya minta Pertamina menyiapkan langkah strategis dan taktis untuk mengamankan pasokan BBM, disamping penyelamatan aset Pertamina di Refinery Unit (RU) VI Balongan," tegasnya.

Keberadaan RU VI Balongan sangat strategis bagi Pertamina maupun kepentingan nasional. Sebagai Kilang yang relatif baru (beroperasi sejak 1994) dan telah menerapkan teknologi terkini, Pertamina RU VI mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

"RU VI Balongan menghasilkan produk unggulan seperti Premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina DEX, Kerosene (Minyak Tanah), LPG, dan Propylene. RU VI Balongan juga bertugas menjaga kestabilan pasokan BBM di wilayah DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan Indonesia," ungkapnya.

Menurut Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu kekhawatiran terganggunya pasokan BBM di tiga provinsi tersebut sangat beralasan, mengingat konsumsi rata-rata harian di ketiga provinsi tersebut sangat tinggi.

Berdasarkan data Pertamina, dalam kondisi normal, konsumsi BBM masyarakat di wilayah Operasi Pemasaran Regional (MOR) III yang meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mencapai 26.000 kiloliter per hari, dimana 15.000 kiloliternya dipasok dari Balongan. Sedangkan saat pandemi, konsumsi harian sekitar 23.000 kiloliter.

Sebagian wilayah Jawa Barat dipasok dari Kilang Balongan, dan sebagian lainnya dari Kilang Cilacap. Secara nasional konsumi BBM masyarakat mencapai sekitar 75 juta kiloliter atau sekitar 205.000 kiloliter per hari.

Amin juga meminta Kementerian BUMN mengevaluasi dampak kebakaran kilang Balongan terhadap peta jalan energi nasional dan melakukan langkah strategis dan taktis yang diperlukan.

Sebagaimana diketahui, salah satu Program Strategis Nasional adalah RDMP (Refinery Development Master Plan) untuk meningkatkan produksi kilang-kilang milik Pertamina.

"Kilang Balongan merupakan bagian dari proyek strategis nasional yakni RDMP Balongan Phase 1, 2, dan 3. Jangan sampai terganggu akibat terjadi kebakaran ini," kata Amin.

Berdasarkan data Pertamina, RDMP Balongan fase 1 akan meningkatkan kapasitas pengolahan dari 125 ribu barel per hari menjadi 150 ribu barel per hari. Target RDMP Balongan mulai beroperasi tahun depan untuk fase 1, tahun 2023 untuk fase 2, dan tahun 2026 untuk fase 3. Selain di Balongan, proyek RDMP juga dikerjakan di kilang minyak Balikpapan, Cilacap, dan Plaju. Sehingga nantinya kapasitas produksi BBM nasional mencapai 1,8 juta barel per hari.

AMIN AK,M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Kilang Balongan merupakan bagian dari proyek strategis nasional yakni RDMP Balongan Phase 1, 2, dan 3. Jangan sampai terganggu akibat terjadi kebakaran ini

PKS

Semangat MELAYANI Semangat RAMADHAN

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

Program Quote
Hikmah Ramadhan

Ramadhan adalah bulan **penuh berkah**

jadikan syukur pada setiap tarikan nafas kita, sematkan dzikir pada setiap detak jantung kita, insha Allah kita akan jadi orang yang beruntung

Aleg PKS Desak Menteri ESDM Tindak Tegas Pengusaha Batubara yang Langgar DMO

KUTIPAN

Jakarta (27/03) –– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah menindak tegas perusahaan penambang batu bara yang terbukti melanggar ketentuan kuota penjualan batu bara dalam negeri atau Domestic Marketing Obligation (DMO).

Pemerintah harus konsisten melaksanakan ketentuan DMO ini agar semua perusahaan penambang batu bara patuh dalam mengalokasikan 25 persen produksinya untuk keperluan industri dalam negeri. Sebab sekecil apapun pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengancam stabilitas ketahanan energi dalam negeri.

"Kewajiban DMO sebesar 25 persen produksi perusahaan tambang ini adalah upaya kita untuk menjaga agar listrik dari PLTU tetap menyala. Ini soal ketahanan energi nasional," tegas Mulyanto di Jakarta, Sabtu (27/03).

Mulyanto menilai saat ini ada kecenderungan pengusaha tambang mengambil keuntungan dengan mengekspor batubara yang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pasar dalam negeri (DMO).

Mulyanto menilai tindakan 'ambil untung' dengan mengorbankan kepentingan nasional merupakan sikap yang tidak patut dilakukan.

Menurutnya pengusaha batu bara harus komitmen melaksanakan ketentuan DMO meskipun harga jual batu bara di luar negeri lebih tinggi ketimbang harga dalam negeri.

"Besaran kuota DMO sebagaimana yang diatur dalam Kepmen ESDM rasanya sudah cukup adil. Pengusaha hanya perlu mengalokasikan 25 persen dari total produksinya untuk keperluan industri dalam negeri. Pemanfaatan batu bara di dalam negeri ini untuk kepentingan masyarakat dan kalangan industri itu sendiri. Sebab bagaimana PLN bisa memproduksi listrik jika pasokan batu bara yang merupakan sumber energi utamanya sangat terbatas," jelas Mulyanto.

Seperti diketahui dalam Kepmen ESDM diatur besaran harga batu bara DMO. Jika harga pasaran batu bara dunia sedang tinggi maka harga maksimal batu bara untuk keperluan DMO sebesar USD 70 /ton. Sedangkan bila harga pasaran di dunia rendah maka harga batu bara DMO merujuk pada Harga Batu Bara Acuan (HBA).

"Ini soal godaan iming-iming harga tinggi batubara di luar negeri. Perusahaan tergelitik untuk ambil keuntungan lebih. Diperkirakan godaan ini masih akan terus berlanjut karena harga batu bara terus merangkak naik. Bisa menembus USD 100/ton," ungkapnya.

"Margin dengan capping harga DMO jadi sebesar USD 30/ton. Ini hampir sepertiganya. Jadi godaan untuk melanggar DMO semakin tinggi," imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah harus konsisten melaksanakan ketentuan DMO ini agar semua perusahaan penambang batu bara patuh dalam mengalokasikan 25 persen produksinya untuk keperluan industri dalam negeri. Sebab sekecil apapun pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengancam stabilitas ketahanan energi dalam negeri.

Kilang Minyak Balongan Kebakaran, Aleg PKS: Prihatin dan Desak Evaluasi Menyeluruh seluruh Kilang!

KUTIPAN

Nurhasan juga mendesak Pertamina dan Pemerintah mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi dampak dari peristiwa tersebut terutama penanganan korban yang mayoritas warga sekeling kilang serta pemulihan kondisi termasuk antisipasi menjalarnya kebakaran.

Jakarta (29/03) — Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, mengutarakan keprihatinannya atas peristiwa Kebakaran di Kilang minyak, Bolongan, Indramayu, Jawa Barat yang terjadi Senin dinihari, (29/03).

"Kita kaget dan prihatin dengan kejadian kebakaran ini. Dalam industri perminyakan dan gas, harusnya semua sdh dipastikan Zero Accident, standar operasionalnya harus ketat dan dan tidak bisa ditawar utk semua pihak. Jadi, kita akan evaluasi, ini masalah serius, kita akan panggil direktur Pertamina dan bila perlu kita dorong pembentukan panja khusus investigasi, agar musibah sejenis tidak terjadi", ungkapnya.

Nurhasan juga mendesak Pertamina dan Pemerintah mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi dampak dari peristiwa tersebut terutama penanganan korban yang mayoritas warga sekeling kilang serta pemulihan kondisi termasuk antisipasi menjalarnya kebakaran.

"Kita semua tau bahwa balongan adalah kilang yang sangat vital bagi industri minyak mentah Indonesia, baru beberapa hari kemarin lalu kebakaran kilang di balik papan, kejadian-kejadian ini jadi refleksi dari sistem pengelolaan industri minyak kita, sekarang saat yang tepat untuk berbenah" ujarnya.

Sesungguhnya kasus kebakaran dan permasalahan kilang minyak bukan kali pertama terjadi, bahkan belum lama ini juga terjadi percikan api mendadak muncul di areal kilang PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit (RU) V Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (26/3/2021).

"Tentu ini menjadi langkah penting untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kilang minyak PT Pertamina. Disisi lain juga otoritas seperti BPH Migas dan Kementerian ESDM harus serius memastikan seluruh langkah revitalisasi kilang dilakukan dengan serius," pungkas Nurhasan.

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I
Anggota Komisi VII DPR RI

"Kita semua tau bahwa balongan adalah kilang yang sangat vital bagi industri minyak mentah Indonesia, baru beberapa hari kemarin lalu kebakaran kilang di balik papan, kejadian-kejadian ini jadi refleksi dari sistem pengelolaan industri minyak kita, sekarang saat yang tepat untuk berbenah"

Dukung Hilirisasi Industri Pertambangan

Aleg PKS: Pembangunan Smelter di Papua Jangan hanya Janji

KUTIPAN

Jakarta (31/03) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto mendukung pembangunan Smelter di Pomako Mimika Papua untuk diteruskan sampai selesai.

Hal itu, Menurut Rofik, untuk mendukung program hilirisasi industri pertambangan dan mendorong multiplier efek ekonomi di daerah.

"FPKS mendukung pembangunan Smelter di Pomako Papua untuk dapat diteruskan dalam rangka hilirisasi industri pertambangan dan mendorong multiplier efek ekonomi di daerah," kata Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Rofik mengatakan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kemen ESDM RI, Dirut Mind-ID, dan Pemerintah Provinsi Papua tentang Kepemilikan Saham pada PT Freeport Indonesia, Rabu (31/03).

"Yang menjadi problem, kenapa kita dengan mata telanjang tahu begitu besar penambangan di Papua dan tidak pernah habis-habis, bahkan semakin hari semakin bertambah, kenapa sekadar memberikan Smelter saja. hanya janji-janji, hanya ngomong saja, hanya menjadi sesuatu yang menjadi angan-angan," kritiknya.

Menurut wakil rakyat dari Dapil Jateng VII ini, keberadaan Smelter ini sudah sangat penting. Kalau seandainya Smelter ini sebagai bentuk semangat nasionalisme untuk mengelola tambang sendiri, untuk bisa mengoptimasi di negeri sendiri maka semestinya kita harus mendorong dan memastikan menjadi kenyataan di tahun-tahun ini.

"Bahkan menjadi semangat kita di Komisi VII DPR RI agar pembangunan smelter selesai di periode ini. Jangan sampai berlalu begitu saja dan di periode berikutnya muncul lagi, dan Smelter hanya menjadi angan-angan lagi," ingatnya.

Penyelesaian pembangunan Smelter ini juga disampaikan Pemprov Papua. Dengan kepemilikan saham Indonesia yang mayoritas (saham Pemda Papua) maka perusahan wajib memperhatikan dalam rangka hilirisasi industri pertambangan maka pembangunan Smelter di Pomako Mimika Provinsi Papua dapat diteruskan.

Rofik mengapresiasi semangat masyarakat Papua yang telah memperjuangkan hak-haknya atas kekayaan Papua yang sangat melimpah.

"Kami sangat support kepada Papua yang telah memberikan kontribusi begitu besar untuk pendapatan negara agar benar-benar bisa merasakan kekayaannya sendiri dengan optimal," ujar Rofik.

Menurut Rofik, dari sejak zaman Presiden Soekarno tahun 1961-1963 Freeport sudah dijalankan sampai beberapa presiden. Selama 60 tahun lebih kekayaan alam Papua semakin hari semakin dikeruk diambil tembaganya. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh.

"Di laporan yang ada, prognosa 2021 bahkan Freeport akan memberikan prognosa 2x lipat revenue yang akan didapatkan. Saya tidak ingin prognosa 2x lipat produksi tahun ini kembali lagi kekayaan ini hanya lari keluar negeri dan tidak kembali ke Indonesia," katanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Komisi VII DPR RI

> "Keberadaan Smelter ini sudah sangat penting. Kalau seandainya Smelter ini sebagai bentuk semangat nasionalisme untuk mengelola tambang sendiri, untuk bisa mengoptimasi di negeri sendiri maka semestinya kita harus mendorong dan memastikan menjadi kenyataan di tahun-tahun ini."

PKS Sejak Awal Usulkan dan Perjuangkan, Alhamdulillah 27.303 Guru Agama Masuk Rekrutmen PPPK

8 Maret 2021

Tuntut keadilan, HNW minta Guru Agama dimasukkan dalam program rekrutmen satu juta guru PPPK

13 Maret 2021

HNW: Janji Mendikbud Memasukkan Guru Agama dalam Rekrutmen PPPK Harus Dikawal Kemenag

15 Maret 2021

Dihadapan Menteri Agama saat Raker dengan Komisi VIII, mendesak Menteri Agama perjuangkan guru agama dalam rekrutmen PPPK 2021.

19 Maret 2021

Advokasi berhasil. Sebanyak 27.303 formasi guru agama masuk dalam rekrutmen PPPK

Kunker ke Kab. Tangerang,

Bukhori Dorong Bupati Wujudkan Perbaikan Sanitasi Pesantren

KUTIPAN

Tangerang (02/04) --- Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tangerang

Dalam kunjungannya, rombongan diterima langsung oleh Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, serta pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang bertempat di kantor Bupati Tangerang, Kamis (01/04/2021).

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyampaikan apresiasi atas perhatian Bupati Tangerang terhadap pesantren melalui program pemerintah daerah bertajuk Sanitasi Berbasis Pondok Pesantren (Sanitren).

Bukhori berharap, program Sanitren bisa ditiru oleh wilayah lain dan menjadi prototype program nasional.

"Sebelumnya, saya mengapresiasi perhatian Pak Bupati terhadap pesantren karena dilakukan secara natural, dan tidak terkesan dibuat-buat. Pasalnya, undang-undang tentang pesantren sejatinya baru disahkan pada tahun 2019, akan tetapi program Bupati untuk pesantren sudah disusun sejak tahun 2013," ungkap Bukhori

Untuk diketahui, program Sanitren adalah kebijakan yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang sanitasi dan air bersih dengan cara membangun fasilitas sanitasi yang memadai seperti kamar mandi, toilet, tempat mencuci santri, penyediaan air bersih, dan fasilitas sanitasi lain di lingkungan pesantren.

Selain itu, Anggota Baleg ini juga mendorong ada upaya lain dari Bupati Tangerang untuk menghadirkan lingkungan pondok pesantren yang sehat, disamping melalui program Sanitren.

Lebih lanjut, Bukhori mengusulkan supaya gerakan sanitasi untuk pesantren ini turut ditunjang oleh fungsi penyadaran berdasarkan penjelasan saintifik dan proporsional kepada santri maupun warga di pesantren.

"Dukungan terhadap isu sanitasi di pesantren menjadi penting untuk hindarkan stigma miring. Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri sumber masalah bukan hanya pada sanitasi atau ketersediaan sumber air bersih semata. Gaya hidup santri juga perlu dibentuk sehingga memiliki konsen pada kebersihan, salah satunya melalui fungsi penyadaran," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua DPP PKS ini juga menyoroti sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Tangerang yang belum berbadan hukum.

Alhasil, Bukhori mendorong Bupati untuk segera membantu fasilitasi sejumlah pesantren tersebut untuk memperoleh status badan hukum supaya bisa beroperasi secara leluasa dan lebih akuntabel.

"Dari 911 pondok pesantren, tercatat baru 829 pondok yang sudah berbadan hukum. Lantas, apa yang menjadi kendala sehingga belum semua ponpes dilegalisasi? Mohon Pak Bupati bisa segera bantu fasilitasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, program Sanitren sejatinya akan menyasar 829 pondok pesantren. Tahun 2018 sudah ada 46 sanitren sebagai pilot project. Kemudian, di tahun 2019 bertambah menjadi 250 Sanitren. Akan tetapi, untuk tahun 2020 dan 2021 sempat tertunda akibat anggaran yang ada harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Dukungan terhadap isu sanitasi di pesantren menjadi penting untuk hindarkan stigma miring. Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri sumber masalah bukan hanya pada sanitasi atau ketersediaan sumber air bersih semata. Gaya hidup santri juga perlu dibentuk sehingga memiliki konsen pada kebersihan, salah satunya melalui fungsi penyadaran

BPJS Ketenagakerjaan Diminta Tingkatkan Perluasan Kepesertaan

KUTIPAN

Komisi IX DPR RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan promosi dan sosialisasi program kepesertaan secara masif dan intensif guna meningkatkan perluasan kepesertaan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

"Kami meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Dewas menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan (RKAT) tahun 2021 dan roadmap tentang perluasan kepesertaan program jaminan sosial termasuk pada peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pekerja informasi dan peserta non aktif," sambung Ansory.

Selain meningkatkan perluasan peserta BPJS bidang Ketenagakerjaan, Komisi IX juga meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyelarasan data kepesertaan dengan pihak pemberi kerja guna menghindari data kepesertaan yang berbeda atas penghasilan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan.

"Serta menyempurnakan pedoman investasi dalam rangka meningkatkan keamanan seluruh investasi yang ditempatkan secara variatif di berbagai lembaga keuangan dan dunia usaha dan Melaporkan rencana strategis program investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021," ucapnya.

Komisi IX juga mendesak Dewan Pengawas BPJS bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan pengawsasan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan kualitas kinerja dan pelayanan bagi para peserta.

Di samping itu, Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan kajian yang intensif dan serius terhadap seluruh aturan perundang-undangan dalam rangka usulan pengharmonisasian regulasi sehingga dapat menunjang peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan secara kelembagaan.

Terakhir, pihaknya juga meminta BPJS bidang Ketenagakerjaan untuk segera menyikap Program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan secara reguler melaporkan kepada Komisi IX DPR RI.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam meminta Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk menjangkau lebih banyak tenaga kerja Indonesia untuk bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan jumlah angkatan kerja di Indonesia dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terbilang masih sangat rendah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. ANSORY SIREGAR, Lc,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Selain meningkatkan perluasan peserta BPJS bidang Ketenagakerjaan, Komisi IX Direksi BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan penyelarasan data kepesertaan dengan pihak pemberi kerja guna menghindari data kepesertaan yang berbeda atas penghasilan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan.

Aleg PKS Minta THR Tak Lagi Dicicil, karena Bisa Lemahkan Daya Beli Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (29/03) --- Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020.

Mufida meminta pelaksanaan pembayaran THR dengan dicicil tahun lalu dilakukan evaluasi. Terlebih ada informasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan yang belum selesai melakukan pembayaran cicilan THR.

"Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang. Kita ingin daya beli masyarakat meningkat pada saat Ramadhan dan Idul Fitri," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/03).

Mufida menekankan, saat ini perekonomian sudah mulai muncul harapan perbaikan. Data BPS menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang Q3-Q4 berangsur membaik meski masih berada di zona minus. Berturut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 (-5,32) pada Q3 (-3,43) dan pada Q4 (-2,19).

Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri pengolahan dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 2 persen.

"Saya harap Pemerintah memperjuangkan hak-hak Pekerja, saat ini ada sinyal perekonomian mulai membaik. Para pekerja sudah mulai bekerja seperti saat sebelum pandemi, hanya saja saat ini mereka bekerja dengan menerapkan protokol Covid-19. Sehingga kesejahteraan Pekerja harus diberikan sebagaimana mestinya," kata Mufida.

"Aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk membayar penuh THR kepada para pekerja, sesuai peraturan perundangan yang ada," kata dia.

Mufida juga mengatakan, Dinas Tenaga Kerja setempat juga bisa menjadi jembatan pencarian jalan keluar terutama bagi perusahaan kecil yang masih terdampak.

"Untuk perusahaan kecil jika akan ada kebijakan khusus, bisa melakukan dialog soal THR dengan serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja setempat," terangnya.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

> "Saya harap Pemerintah memperjuangkan hak-hak Pekerja, saat ini ada sinyal perekonomian mulai membaik. Para pekerja sudah mulai bekerja seperti saat sebelum pandemi, hanya saja saat ini mereka bekerja dengan menerapkan protokol Covid-19. Sehingga kesejahteraan Pekerja harus diberikan sebagaimana mestinya"

Pemerintah Realisasikan Sekolah Tatap Muka

Aleg PKS Pertanyakan Realisasi Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik

KUTIPAN

Jakarta (31/03) --- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021, setelah guru dan tenaga pendidik divaksin Covid-19.

Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta Pemerintah agar transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin.

"Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin? Karena berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap mereka berjalan lambat. Jika informasinya benar, maka sulit dipastikan semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada Juli," kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu (31/03/2021).

Dalam pandangan Netty, bagaimana mungkin PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai.

"Kita tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19?" Ujarnya

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak.

"Semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada kekhawatiran bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja, padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Bagaimana nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin?" ungkap Netty.

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS, semua prasyarat PTM mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM harus terpenuhi.

"Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan saat kebijakan PTM diberlakukan," tandasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan saat kebijakan PTM diberlakukan

Selamat Milad

PKS

Dr. H.M.

HIDAYAT NURWAHID MA

8 APRIL

Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam usianya

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Aleg PKS Harap Pemerintah Tak Hanya Perhatikan Destinasi Super Prioritas dan Lupakan Daerah 3T

KUTIPAN

Jakarta (29/03) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri, memberikan kritik keras terhadap Pemerintah yang kurang memperhatikan daerah 3T dalam pembangunan destinasi pariwisata.

"Kita tidak cemburu dengan adanya alokasi untuk lima destinasi super prioritas, tapi perlu juga kami mengkritisinya. Bagaimana kabarnya dengan Likupang, karena waktu kami berkunjung ke sana dulu dengan perjalanan yang cukup jauh dan kita melewati daerah-daerah yang masih sangat tertinggal, tetapi mendapatkan prioritas anggaran dari pemerintah yang cukup besar," ungkap Sakinah saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kamis, (25/03/2021).

Sakinah pun menambahkan bahwa daerah-daerah tertinggal lainnya juga harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

"Tentunya ini bukan kecemburuan, tetapi tolong pemerintah pusat agar memperhatikan daerah-daerah tertinggal," ungkapnya.

Lebih lanjut Sakinah pun menambahkan bahwa Menteri Pariwisata juga harus melihat langsung kondisi pariwisata yang berada di daerah-daerah 3T.

"Pemerintah juga harus memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal juga. Pak Menteri bisa melihat secara langsung di Sulawesi Tengah," kata Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat.

Politisi PKS ini pun mendorong pemerintah untuk melibatkan Komisi X dalam mengambil keputusan strategis.

"Tolong keberadaan kami dijadikan sebuah kerangka acuan dalam mengambil dan melaksanakan kegiatan. Jangan sampai kami tidak ada lagi marwahnya di daerah," ujar Sakinah.

Di Kabupaten Buol ada sekelompok masyarakat dengan swadaya sendri menam kopi, tanpa ada suntikan dana dari pemerintah.

"Kita tidak hanya bercerita tentang destinasi super prioritas saja, tetapi kita juga harus membangun desa kita," kata Sakinah.

Sakinah pun mendorong pemerintah untuk melihat lebih detail data daerah-daerah tertinggal, bukan hanya menjadi koleksi tapi harus menjadi perhatian Pemerintah.

"Pemerintah harus punya data yang jelas mana saja daerah-daerah yang tertinggal, jangan sampai kita menjadi anak tiri di negeri sendiri," kata Sakinah.

Legislator PKS ini pun menyampaikan agar pemerintah berlaku adil terhadap daerah-daerah 3T terutama dalam penempatan aggaran.

"Jadi ada keadilan dalam penempatan anggaran," pungkas Sakinah mengakhiri.

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Komisi X DPR RI

"Kita tidak cemburu dengan adanya alokasi untuk lima destinasi super prioritas, tapi perlu juga kami mengkritisinya. Bagaimana kabarnya dengan Likupang, karena waktu kami berkunjung ke sana dulu dengan perjalanan yang cukup jauh dan kita melewati daerah-daerah yang masih sangat tertinggal, tetapi mendapatkan prioritas anggaran dari pemerintah yang cukup besar

Anggota FPKS Siap Kawal Pembelajaran Tatap Muka

KUTIPAN

Jakarta (02/04) --- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad akan menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 2021

setelah lebih dari setahun sekolah-sekolah terpaksa menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), atau siswa belajar di rumah.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes mengatakan Pembelajaran Jarak Jauh selama setahun ini mengalami beberapa kendala.

"Banyak tantangan dan masalah yang muncul, terutama dalam kaitannya dengan tumbuh kembang siswa (anak)," ungkap Fahmy.

Dari hasil evaluasi, lanjut Fahmy, PJJ berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan.

"Meningkatnya risiko putus sekolah pada siswa dan angka penurunan capaian belajar menjadi faktor utama kekhawatiran pemerintah," terangnya.

Dampak psikologis PJJ yang berkepanjangan, imbuhnya, sesungguhnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung bulan Juni tahun lalu.

"Sebanyak 19,6 % dari siswa (responden) mengaku cemas dan khawatir, 12,5 % merasa bosan, 9% merasa akan kehilangan kemampuan penguasaan materi, dan 8,3 % merasa akan butuh liburan jika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang," papar Anggota DPR asal Jawa Barat ini.

Sementara itu, lanjut Fahmy, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan angka anak putus sekolah dan pernikahan dini imbas dari pelaksanaan PJJ yang berkepanjangan (detiknews.com, 21 Peb 2021).

"Bila dikaitkan dengan negara-negara lain yang terdampak Covid 19, perkembangan pendidikan Indonesia tertinggal jauh dengan negara lain. Dari semua 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85% negara tersebut sudah mulai PTM, Indonesia masuk yang 15% negara yang masih menyelenggarakan pembelajaran di rumah atau PJJ," urai Fahmy.

Sementara itu, lanjutnya, pakar Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menegaskan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan jika tingkat kasus positif (positivity rate) infeksi virus corona di suatu daerah rendah atau kurang dari 5% sehingga masuk dalam kategori zona aman.

"Indonesia berada di tingkat positif sekitar 13%, yang artinya memiliki penularan tinggi dan berbahaya bagi murid jika harus bersekolah. Kondisi yang dilematis ini harus disikap dengan bijak, agar kita dapat lolos dari ancaman kedua sisi yang berbahaya bagi kelangsungan generasi bangsa," papar Fahmy.

"Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara sehat, baik fisik maupun mental. Terlindungi dari ancaman bahaya covid-19 yang mengintai, dan juga ancaman dampak-dampak negatif tumbuh kembang kecerdasan, sikap sosial, sikap mental dan karakter mereka," imbuhnya.

Pemerintah (Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri), tambah Fahmy, harus bahu membahu mengawal dan memastikan bahwa Pembelajaran Tatap Muka di bulan Juli 2021 dapat berjalan aman, sehat dan efektif. Setidaknya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan:

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed
Anggota Komisi X DPR RI

> "Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara sehat, baik fisik maupun mental. Terlindungi dari ancaman bahaya covid-19 yang mengintai, dan juga ancaman dampak-dampak negatif tumbuh kembang kecerdasan, sikap sosial, sikap mental dan karakter mereka"

#RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan
Sabtu, pukul 10.00 WIB
hanya di:
youtube **PKSTV DPR RI**

Jelang Ramadhan, Anggota Komisi XI FPKS Pantau Kondisi Ekonomi Lampung Selatan

KUTIPAN

Junaidi menyampaikan, tren setiap menjelang puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri terkait permintaan ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta kebutuhan dana tunai oleh masyarakat terus meningkat dari hari biasanya.

Lampung Selatan (02/04) --- Menjelang bulan Ramadhan, Anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, (01/04/2021).

Ketua Tim Kunker dari Fraksi PKS, Junaidi Auly mengatakan, tujuan dari kunker tersebut adalah untuk menjalankan tugas konstitusional DPR RI.

"Tujuan kunker ini yaitu untuk melihat kondisi perekonomian daerah menjelang puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan," ujar Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi menyampaikan, tren setiap menjelang puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri terkait permintaan ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta kebutuhan dana tunai oleh masyarakat terus meningkat dari hari biasanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, dengan kunker spesifik tersebut, pihaknya berharap memperoleh gambaran terkait kesiapan Pemkab Lampung Selatan, BI, BPS, dan pihak Perbankan dalam menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Kami ingin mengetahui langkah-langkah efektif apa saja yang sudah dilakukan Pemkab Lampung Selatan dalam mengakomodir ketersediaan distribusi dan penetapan harga dari semua kebutuhan bahan pokok menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Doktor ilmu Pemerintahan IPDN ini mengaku senang melihat keberpihakan pemerintah dan perbankan dalam rangka membina UMKM dengan memberikan partisipasi penuh dalam upaya mengembalikan perekonomian di Lamsel. Untuk itu, ia berharap dengan adanya keseriusan ini, masyarakat Lamsel dapat merasakan kembali kesejahteraannya seperti di masa sebelum pandemi.

"Mereka juga dalam tahap membuka kembali sektor-sektor produktif. Saya rasa dengan mengembangkan potensi lokal, dalam hal ini pertanian, Lamsel akan segera bangkit dari masa sulitnya satu tahun belakangan. Oleh karena itu, momentum ini harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang populer. Dan itu sudah diupayakan," tukas Politisi asli Lampung ini.

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.
Anggota Komisi XI DPR RI

"Kami ingin mengetahui langkah-langkah efektif apa saja yang sudah dilakukan Pemkab Lampung Selatan dalam mengakomodir ketersediaan distribusi dan penetapan harga dari semua kebutuhan bahan pokok menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri,"

Legislator PKS: Pindah Ibukota Menambah Beban Rakyat

KUTIPAN

Anggota DPR asal Medan ini menyarankan Pemerintah ketika merumuskan kebijakan hendaknya berdasar kajian yang mendalam, ilmiah, dan berdasarkan aspirasi kepentingan rakyat.

Jakarta (31/03) -- Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah mengkritisi rencana groundbreaking ibukota baru oleh pemerintah pada tahun 2021 saat resesi ekonomi terus berlanjut dan belum ada tanda pandemi berakhir.

"Sangat tidak elok saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap kuartal negatif tapi sudah bicara pindah ibukota, kecuali janji ekonomi meroket 7 persen sudah terpenuhi, belanja negara mesti dikontrol lantaran penerimaan sedang buruk," ujarnya di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta (31/03).

Menurut Hidayatullah pemerintah harus fokus dulu mengurus pandemi yang berdampak pada perekonomian secara signifikan.

"Lihatlah negara yang mampu kendalikan pandemi, Vietnam tumbuh positif selama tiga kuartal di 2020. Juga Taiwan meski tumbuh negatif di kuartal II/2020, tapi di kuartal III, Taiwan sudah tumbuh 1,59%." ungkapnya.

Legislator PKS ini juga mengkritisi argumen pejabat Pemerintah yang menyatakan bahwa pembangunan ibukota negara yang baru akan turun membantu situasi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Hidayatullah, iming-iming kondisi perbaikan ekonomi tersebut tidak berdasar pada data dan kajian ilmiah.

"Menurut riset INDEF saja pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur cuma menyumbang 0,0001 persen terhadap PDB nasional, alias tidak berpengaruh signifikan atas PDB", tutur Hidayatullah.

"Apalagi dengan rayuan akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, itu kurang tepat. Pembangunan infrastruktur terkini tidak memerlukan banyak pekerja karena sudah mengunakan mesin otomatis yang canggih, jadi bukan proyek padat karya," ujar Hidayatullah menambahkan.

Anggota DPR asal Medan ini menyarankan Pemerintah ketika merumuskan kebijakan hendaknya berdasar kajian yang mendalam, ilmiah, dan berdasarkan aspirasi kepentingan rakyat.

"Pemindahan Ibu Kota jelas akan mempersempit ruang fiskal yang kian terbatas, utang negara saja sudah tembus Rp 6.361 triliun dan rakyat pasti akan menanggungnya nanti dengan setoran pajak mereka, pindah Ibu Kota menambahi beban rakyat" katanya.

H. HIDAYATULLAH, S.E
Dapil Sumatera Utara I

"Pemerintah harus fokus dulu mengurus pandemi yang berdampak pada perekonomian secara signifikan. Lihatlah negara yang mampu kendalikan pandemi, Vietnam tumbuh positif selama tiga kuartal di 2020. Juga Taiwan meski tumbuh negatif di kuartal II/2020, tapi di kuartal III, Taiwan sudah tumbuh 1,59%

Kunker di Jawa Timur, Anis Minta BI, OJK dan Himbara Buat Program Terobosan saat Pandemi

KUTIPAN

Surabaya (03/04) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti ketimpangan (in equality) dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur, Kamis (01/04/2021).

Kunjungan kerja spesifik dilakukan dalam rangka Sosialisasi UU CIPTA KERJA dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank Indonesia.

Hadir dalam acara ini Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner OJK, Wakil Gubernur Jawa Timur, BPS, Bulog, dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Menanggapi paparan dari BI, OJK, BPS dan Himbara, Anis Byarwati yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan tentang masalah ketimpangan yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Anis menyoroti data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020, dimana angka pengangguran sangat tinggi. Dan tingginya angka pengangguran akibat pandemi Covid-19 ini didominasi oleh masyarakat miskin yang jumlahnya 54%, sedangkan masyarakat menengah jumlah pengangguranya 39%, dan masyarakat kaya jumlahnya 7%.

Data ini dengan jelas menegaskan bahwa pengangguran di Indonesia separuhnya adalah masyarakat miskin.

Menurut Anis, hal ini menuntut program-program yang dicanangkan pemerintah seharusnya menyasar masyarakat miskin.

"Jadi kalau kita melihat paparan program-program yang dipaparkan tadi, yang ingin betul-betul ingin saya tekankan, semestinya program-program tersebut dapat memperbaiki angka ketimpangan," tutur Anis.

Selain itu, Anis juga menyoroti penurunan pendapatan yang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan masyarakat miskin.

Jika dikaitkan dengan WFH (Work From Home), data menunjukkan yang melakukan WFH sebagian besarnya adalah pekerja berpendapatan tinggi yang jumlahnya 47%.

Sedangkan masyarakat miskin harus berjibaku dengan tingginya working hour atau mencari pekerjaan sampingan.

"Itu sebabnya ketimpangan selalu linier dengan kerentanan menghadapi covid. Semakin besar ketimpangan disuatu daerah, maka semakin rentan masyarakat di daerah tersebut terpapar covid-19. Saya kembali mengingatkan agar program-program yang digulirkan pemerintah harus benar-benar menyasar masyarakat miskin yang paling terdampak dengan pandemi," ucapnya menekankan.

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini kemudian mengangkat data sakernas terkait dengan pengguna e-commerce di Indonesia yang menyebutkan bahwa 63,39% pengguna e-commmerce merupakan masyarakat kaya, 34,62% masyarakat menengah dan hanya 18,92% penggunanya masyarakat miskin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Ketimpangan selalu linier dengan kerentanan menghadapi covid. Semakin besar ketimpangan disuatu daerah, maka semakin rentan masyarakat di daerah tersebut terpapar covid-19. Saya kembali mengingatkan agar program-program yang digulirkan pemerintah harus benar-benar menyasar masyarakat miskin yang paling terdampak dengan pandemi

PROGRAM
INTERNSHiPKS
BIDANG HUMAS FRAKSI PKS DPR RI

PENGUMUMAN

PENERIMAAN SELEKSI MAHASISWA MAGANG BATCH III HUMAS FRAKSI PKS DPR RI

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah melalui proses seleksi untuk Magang di Fraksi PKS DPR RI.

Dari hasil penilaian dan pertimbangan diputuskan yang berkesempatan untuk Magang Batch III Fraksi PKS DPR RI periode April-Juni 2021 adalah:

1. **Windi Trikusumawati**
   Universitas Al Azhar Indonesia
2. **Miftah Fauzi Sutisna**
   Universitas Al Azhar Indonesia
3. **Adams Pratama Yanuar**
   UIN Syarif Hidayatullah
4. **Izzul Fadhil Insani**
   UIN Syarif Hidayatullah
5. **Fadilla Embun Firdausy**
   Universitas Indonesia
6. **Nadhia Rahmani**
   Universitas Padjadjaran
7. **Rachmat Afi Azzam Pehang**
   Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
8. **Achmad Septian Trimukti**
   UPN Veteran Jakarta
9. **Michelea Lundayan Regend**
   President University
10. **Mutia Fakhira Raharjo**
    Politeknik Negeri Jakarta
11. **Anggina Putri**
    Universitas Sriwijaya
12. **Latasya Amiera Kylena**
    Universitas Telkom

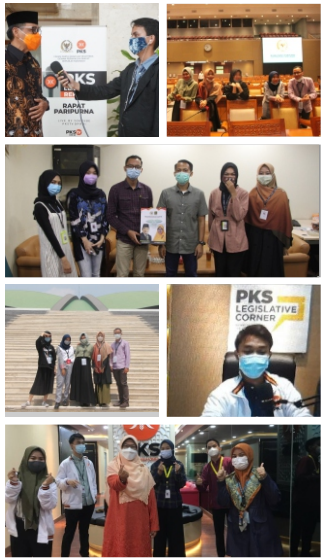

Bagi yang terpilih akan dihubungi untuk briefing dan pembekalan.

Kepada sahabat yang belum terpilih, semoga di lain kesempatan anda bisa berkolaborasi bersama kami.

HUMAS FRAKSI PKS DPR RI

Anggota Baleg FPKS Dorong Hak Penyandang Disabilitas Makin Terakomodir Dalam RUU SKN

KUTIPAN

Jakarta (30/03) --- Perkembangan RUU Sistem Keolahragaan Nasional sudah memasuki tahapan harmonisasi di Badan Legislasi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Ledia Hanifa Amaliah, memberikan masukan yang mendorong agar hak para penyandang disabilitas semakin terakomodir di dalam RUU SKN

Mengacu pada Pasal 44 dalam naskah RUU SKN, Ledia meminta agar Komisi X DPR RI sebagai pengusul menambahkan konteks para penyandang disabilitas di dalam pasal tersebut.

"Pasal 44 ini telah menjabarkan mengenai kesertaan olahragawan Indonesia dalam event-event internasional. Namun sepertinya masih ada yang terluput, yaitu yang terkait kepada kegiatan olahraga yang diikuti para penyandang disabilitas." katanya

Ledia mengapresiasi bahwa pemerintah telah cukup menunjukkan komitmen untuk mendukung para atlet penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan event olahraga bagi para penyandang disabilitas juga mengirimkan para atlet Indonesia penyandang disabilitas ke ajang internasional. Namun tentu hal tersebut akan semakin kuat bila termaktub pula di dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional.

"Atlet-atlet kita yang penyandang disabilitas secara defacto sudah banyak berlaga baik di specialympic, paralympic, deaflympic dan lain-lain. Dan para atlet penyandang disabilitas ini juga sudah ada organisasinya masing-masing. Maka menjadi perlu juga untuk diperhatikan oleh para pengusul RUU agar ketika menyebutkan tentang komite olimpiade yang ada di dalam pasal 44 ini juga memasukkan di dalamnya komite bagi para atlet penyandang disabilitas agar mereka juga bisa punya akses langsung pada aktivitas-aktivitas tersebut," papar Ledia.

Dengan memasukkan penyebutan secara definitif kesertaan komite olimpiade para penyandang disabilitas ini ke dalam naskah RUU SKN, imbuh Ledia, merupakan satu bukti langsung atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak para penyandang disabiltas yang telah menjadi amanah Undang-undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Atlet-atlet kita yang penyandang disabilitas secara defacto sudah banyak berlaga baik di specialympic, paralympic, deaflympic dan lain-lain. Dan para atlet penyandang disabilitas ini juga sudah ada organisasinya masing-masing. Maka menjadi perlu juga untuk diperhatikan oleh para pengusul RUU agar ketika menyebutkan tentang komite olimpiade yang ada di dalam pasal 44 ini juga memasukkan di dalamnya komite bagi para atlet penyandang disabilitas agar mereka juga bisa punya akses langsung pada aktivitas-aktivitas tersebut"

You Stay At Home,
We Stay At Parliament
DPR - RI
PKS

Dampingi Penyalurkan Bantuan, Nevi Serahkan Ambulance pada Empat Yayasan di Sumbar

KUTIPAN

Pasaman Barat (28/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina pada aktivitas kinerja di daerah pemilihannya, turut mendampingi proses penyerahan bantuan Ambulan kepada empat yayasan di Wilayah Sumatera Barat.

Yayasan tersebut antara lain, Yayasan Al Kahfi Pasaman barat, yayasan Rabbaniyyun Padang Pariaman, yayasan Al Madani lubuk Sikaping dan yayasan Auladi 50 kota.

Legislator Sumbar ini pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan atas penyerahan bantuan ambulan ini. Karena sebuah pandangan sangat positif anggota DPR RI turut serta turun ke masyarakat dengan membawa aura yang positif demi kemajuan daerah.

"Saya berterima kasih kepada PT Bukit Asam yang telah menyalurkan beberapa Ambulan ke Wilayah Sumatera Barat. Semoga upaya ini dapat menolong dan memberi kemudahan dalam urusan bapak ibu masyarakat semuanya. Setiap orang pasti ingin sehat wal'afiat dan lancar segala urusan. Namun ada saatnya kita tidak mampu menghindari sakit dan musibah. Ketika itu terjadi, maka dengan tolong menolong lah kita dapat kuat dan mampu menghadapinya", kata Nevi dalam sambutannya.

Politisi PKS ini tidak lupa menyampaikan, kepada masyarakat penerima bantuan ambulan agar saling mendo'akan dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Khusus permintaan doa kepadanya agar bisa lebih maksimal membersamai masyarakat. Ia juga sangat mengharapkan agar menghindari keadaan berjarak dengan masyarakat. Yayasan yang memiliki fasilitas di harapkan dapat memberikan pelayanan dan membantu masyarakat semampunya.

"Tolong jangan pernah berjarak dengan masyarakat. Layani masyarakat, bantu masyarakat. Mudahkan urusan masyarakat. Allah akan memudahkan urusan hambanya ketika Hambanya memudahkan urusan sesamanya", tutup Nevi Zuairina.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Tolong jangan pernah berjarak dengan masyarakat. Layani masyarakat, bantu masyarakat. Mudahkan urusan masyarakat. Allah akan memudahkan urusan hambanya ketika Hambanya memudahkan urusan sesamanya"

WNI Diserang Anti-Asia di AS,

HNW Minta Kemlu Segera Beri Perlindungan Ekstra WNI di Luar Negeri

KUTIPAN

Jakarta (30/03) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid prihatin, dengan jatuhnya dua warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban akibat meluasnya gerakan rasial anti Asia di Amerika Serikat.

Pria yang akrab disapa HNW ini meminta agar pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri memaksimalkan gerakan dan langkah untuk melindungi Warga Negara Indonesia di Amerika Serikat khususnya dan di negera-negara lainnya, pasca penyerangan berbau rasial terhadap dua WNI di Kota Philadelphia, AS itu.

HNW, Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II meliputi Luar Negeri, mengapresiasi Kemlu RI yang sudah sigap melakukan koordinasi dan komunikasi diplomatik ke AS, tetapi memperhatikan trend dan modusnya dipentingkan juga untuk menyiapkan langkah-langkah preventif agar peristiwa serupa atau bahkan yang lebih parah tidak terjadi lagi kepada WNI di AS atau negara-negara lain.

Apalagi, imbuhnya, dalam beberapa pekan belakangan, kasus rasial anti-asia semakin meningkat tajam di AS, sebagai ungkapan kekesalan sebagian warga yang menyalahkan China (Tiongkok) atas merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

"Perlindungan terhadap korban rasialisme anti Asia di AS sangat penting dilakukan. Namun, juga sangat dipentingkan langkah-langkah preventif dan pencegahan agar kasus serupa tidak menimpa lagi WNI di AS atau negara lainnya. Ini harus diwaspadai karena sentimen Anti-Asia maupun gerakan rasial lainnya semisal Supremasi Putih, islamophobia dll bisa saja merebak ke negara-negara barat lainnnya, hingga ke Eropa," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (30/03).

HNW berharap agar pihak Kemlu RI segera berkomunikasi dengan otoritas di negara-negara yang berpotensi terjadinya gelombang sentimen anti-asia maupun gerakan rasial lainnya di AS maupun di Eropa. Hal ini perlu dilakukan agar peristiwa serupa tidak lagi terulang.

"Ini harus segera benar-benar ditangani secara cepat dan serius. Jangan sampai terjadi peristiwa yang lebih parah dari serangan tersebut, yang pasti merugikan kepentingan WNI di Luarnegeri, juga merugikan kepentingan negara Indonesia" ujarnya lagi.

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS tersebut mengatakan bahwa langkah preventif ini diperlukan sebagai upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Melindungi segenap bangsa Indonesia, tentunya termasuk juga para WNI yang tinggal di luar negeri, baik bekerja atau menuntut ilmu di sana. Mereka harus dipenuhi hak konstitusionalnya, dengan mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Negara"

PKS

BIO GRAFIS

Yuk Kenali Aleg Kamu

MARDANI ALI SERA

Profil

- Nama Lengkap
  Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng
- Tempat, Tanggal Lahir
  Jakarta, 09 April 1968
- Dapil
  DKI Jakarta I (Jakarta Timur)

Keluarga

- Istri : **Siti Oniah**
- Anak : **4 Laki-Laki**
  5 Perempuan

Pendidikan

- **SMAN 1 Budi Utomo,** Jakarta Pusat
- **S1 Teknik Mesin, Universitas Indonesia**
- **S2 Master of Enginering, Universiti Teknologi Malaya**
- **S3 Philosophiae Doctorate, Universiti Teknologi Malaya**

Riwayat Pekerjaan

- **Menjadi Da'i utusan DPP PKS ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Arab Saudi untuk mensosialisasikan konsep pembangunan umat madani,** 2008
- **Staff Pengajar Universitas Mercu Buana,** 1992 – Sekarang
- **Kepala Pusat Penelitian Univ. Mercu Buana,** 2006-2007
- **Anggota Komisi II DPR RI,** 2019-2024

Riwayat Organisasi

- **Wakil Sekretaris Jenderal PKS,** 2005-2010
- **Sekretaris Majelis Pertimbangan PKS,** 2010-2011
- **Majelis Syuro PKS,** 2010-sekarang
- **Ketua DPP PKS Bidang Humas,** 2012-2015
- **Wakil Sekretaris Jenderal PKS,** 2015-2016
- **Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan,** 2016-2019
- **Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta,** 2017
- **Ketua DPP PKS Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah,** 2019-2020
- **Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup,** 2020-sekarang

Media Sosial

- : **Mardani Ali Sera**
- : **@MardaniAliSera**
- : **@mardanialisera**
- : **Mardani Ali Sera**
- : **mardanialisera.id**

Desain : Aditya Angga

fraksi.pks.id | Fraksi PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | PKS TV DPR RI

Kunjungi Dapil, Hermanto Serahkan Sembako pada Korban Banjir di Pesisir Selatan

KUTIPAN

"Bantuan sembako ini merupakan rangkaian dari aktivitas kepedulian Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat yang terkena musibah. Sekalipun banjir sudah mulai surut, tetap ada bantuan," papar Hermanto.

Pesisir Selatan (04/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat korban banjir di Kabupaten Pesisir Selatan.

Bantuan sembako tersebut diserahkan secara simbolis kepada warga di Nagari Kampung Tangah Tapan dan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

"Bantuan sembako ini merupakan rangkaian dari aktivitas kepedulian Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat yang terkena musibah. Sekalipun banjir sudah mulai surut, tetap ada bantuan," papar Hermanto.

Kepada para penerima sembako, Hermanto berharap agar bantuan yang diterima bermanfaat dan barokah.

"Bantuan ini wujud kepedulian PKS kepada masyarakat. Dalam suasana menjelang Bulan Ramadhan ini semoga baik yang memberi maupun yang menerima bantuan diberkahi," ucap legislator dari FPKS.

Belum lama ini akibat hujan deras, Sungai Batang Tapan meluap merendam areal persawahan yang ada disekitarnya dan air juga masuk ke rumah-rumah warga setinggi 1-1,5 meter merendam perabotan rumah tangga yang ada didalamnya.

"Saat banjir melanda, relawan PKS Peduli telah dengan sigap membantu warga dengan sembako," ungkap Hermanto.

"Bantuan kali ini merupakan kelanjutan dari bantuan tersebut," pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan di Pesisir Selatan tersebut, Hermanto didampingi 2 pengurus DPD PKS Pesisir Selatan Doni Erisyah Putra dan Cendra Hardi Nurba serta Ketua DPC PKS Basa Ampek Balai Tapan Edison.

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

Bantuan ini wujud kepedulian PKS kepada masyarakat. Dalam suasana menjelang Bulan Ramadhan ini semoga baik yang memberi maupun yang menerima bantuan diberkahi

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nur Azizah: Bulan Ramadhan Jadikan Sarana Pekerat Kebersamaan Keluarga!

KUTIPAN

Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. ajak warga kota Bekasi tingkatkan target ibadah harian bersama keluarga.

dan jadikan bulan Ramadhan tahun ini sebagai sarana perekat kebersamaan. Hal itu disampaikan Nur Azizah pada Sabtu (27/3), dalam agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di kediaman H. Ahmad Segaf, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Menurutnya, seorang kepala keluarga memiliki peranan penting dalam peningkatan kapasitas ibadah khususnya di bulan Ramadhan. "Seorang ayah atau kepala keluarga adalah komandan yang bertugas membuat lingkungan dan aturan serta membimbing keluarga. Untuk para kepala keluarga mulai hari ini jelang Ramadhan sudah harus mulai mengajak keluarganya memperbanyak ibadah sunnah, agar saat menjalani ibadah dan berbagai aktivitas selama Ramadhan tidak terasa berat", jelas Nur Azizah.

Sebagai salah satu anggota Komisi VIII DPR RI, Nur Azizah menjelaskan akan pentingnya pengokohan ketahanan keluarga. Pendidikan keluarga penting untuk membentuk kepribadian anggota keluarga, menjadikan Ramadhan sebagai sarana mengoptimalkan setiap aktivitas ibadah, memantau proses beribadah dengan baik "tentu optimalisasi ibadah ini tidak hanya di bulan Ramadhan saja, harapannya seluruh anggota keluarga menjadi terbiasa terus optimal dalam ibadah meskipun Ramadhan telah usai. Hal ini tentu agar terbentuk pribadi-pribadi muslim yang tangguh", imbuhnya.

Kemudian persiapan dalam menghadapi bulan Ramadhan ini menurut Nur Azizah, diantaranya adalah persiapan rohani, selain merutinkan ibadah wajib, memperbanyak ibadah sunnah dan memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an serta memperbanyak wawasan ilmu keagamaan dengan sering menguti berbagai kajian ilmu. Kemudian persiapan jasmani, biasakan makan-makanan yang sehat dan bergizi kemudian rutin juga berolahraga agar tubuh tetap bugar. Persiapan jasmani ini juga termasuk persiapan harta, dengannya kita dapat berbagi dengan orang di sekitar kita dengan menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Junaidi, Ketua RT 06/07, Kel. Bekasi Jaya, Ustadz Sukismo, salah satu tokoh masyarakat sekaligus Caleg PKS tahun 2019, Ahmad Fahrurozi, Ketua DPRa PKS Bekasi Jaya serta tokoh masyarakat lainnya dan perwakilan masyarakat. Selain bersilaturahim dengan warga sambil memberikan bekalan keilmuan menjelang bulan Ramadhan, pada kesempatan ini, Nur Azizah turut membagikan bekalan paket sembako Kepada 40 warga di RT 06/07 Kelurahan Bekasi jaya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

> Bulan Ramadhan sangat dinanti oleh seluruh umat muslim di dunia, karena bulan ini memiliki banyak sekali keutamaan, di 10 malam terakhir terdapat malam lailatul qadr yang penuh kemuliaan "dengan kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadhan kita umat muslim akan banyak mendapat keuntungan, termasuk mendapatkan lailatul qadr.

Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan
Fraksi PKS DPR RI
fraksipksdprri
@fpksdprri
fraksi.pks.id

Terima Aspirasi Institusi Pendidikan Sumsel

Aleg PKS Upayakan Komunikasi dengan Pihak Kemendikbud

KUTIPAN

Jakarta (30/03) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendukung terjadinya perubahan institusi dari STKIP PGRI Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menjadi Universitas.

Perwakilan STKIP PGRI mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh persetujuan untuk mengubah status dan merger dari institusi menjadi universitas, khususnya pada empat program studi meliputi ilmu komputer, pertanian, kewirausahaan, serta desain komunikasi visual (DKV). Sejak pertama diusulkan dari tahun 2019 lalu, usul perubahan tersebut sudah mendapat empat kali revisi.

Menanggapi aduan tersebut, Abdul Fikri Faqih menyatakan akan segera melakukan komunikasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

"Ini adalah hal yang bagus, melihat sudah ada 3.500 mahasiswa sehingga pantas untuk diperhatikan. Karena semua proses online, diikuti saja. Semoga di hasil kelima, kita sudah masuk. Nanti akan kita komunikasikan dengan Dirjen Pendidikan. Kita akan minta demi membela, mengadvokasi, dan memangku kepentingan Pendidikan." Ujar Abdul Fikri Faqih dalam Hari Aspirasi yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (30/03).

Meskipun begitu, ia berpendapat bahwa proses penyederhanaan jumlah universitas atau merger bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan.

"Secara ringkas, menyederhanakan jumlah universitas atau merger bukan pekerjaan yang ringan, apalagi swasta. Usulan seharusnya melihat tren, dan selama ini pemerintah lebih mempermudah yang vokasi, entah politeknik maupun universitas yang ada vokasinya." Tutur Pimpinan Komisi X tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Dapil Sumatera Selatan I, Mustafa Kamal juga turut menanggapi aduan aspirasi. Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah menanggapi kebutuhan Pendidikan tidak hanya di Palembang namun juga di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

"Dibutuhkan pusat pendidikan selain di Palembang. Kita siap follow-up, apalagi ini sudah dirintis dengan baik sekali, ceritanya sudah ada tinggal dilengkapi saja. Pemerintah harus realistis dan secara objektif jika memang kebutuhan sudah seharusnya ini dilakukan. Ini kan bukan dari nol tapi peningkatan saja." Ucap Mustafa.

Sebelumnya, Institusi dari STKIP PGRI Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengajukan perubahan menjadi universitas. Namun, proses tersebut mengalami beberapa kendala mulai dari syarat berkas-berkas hingga pandemi Covid-19.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Secara ringkas, menyederhanakan jumlah universitas atau merger bukan pekerjaan yang ringan, apalagi swasta. Usulan seharusnya melihat tren, dan selama ini pemerintah lebih mempermudah yang vokasi, entah politeknik maupun universitas yang ada vokasinya

Aleg PKS Akan Perjuangkan Hak Buruh Yang di-PHK Sepihak

KUTIPAN

Jakarta – (6/4) DPP Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indnoesia (FSPASI) melakukan pengaduan kepada Fraksi PKS DPR RI. Hal ini karena ada dua anggota mereka di-PHK secara sepihak sejak 2014 oleh PT S yang beralamat di Pulogadung belum dipekerjakan kembali. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan pihak penggugat dan menganggap keputusan PT S tidak sah. Sayangnya, MA sulit menjalankan keputusan tersebut

"Kata MA, mereka tidak bisa memaksa perusahaan mempekerjakan dua anggota kami, karena tidak ada panduan di undang-undangnya. Kami merasa tidak diperlakukan adil disini. Padahal mereka bisa saja membuat Peraturan MA terkait eksekusi ini" ujar Hery Darmawan selaku Ketua DPP FSPASI kepada Fraksi PKS di Jakarta Selasa, (6/4).

Padahal, menurut Herry, kedua orang yang di-PHK tersebut juga sudah berusaha maksimal. Mereka sudah melayangkan surat ke Komnas HAM, Disnaker, Gubernur bahkan memberikan surat tembusan ke Presiden. Namun, 6 tahun berlalu, belum ada pemanggilan kerja dari perusahaan. Kondisi ini juga dipersulit dengan keputusan perusahaan yang akan relokasi ke Kendal, Jawa Tengah dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PKS DPR RI Alifuddin akan menampung usulan tersebut. "Kami akan menyampaikan ini ke pihak yang berwenang, kalau perlu kami akan panggil perusaha-annya " ujar Alifuddin yang juga anggota Komisi IX DPR RI yang membidani ketenagakerjaan.

Senada dengan itu, Adang Sudradjat yang juga kolega Alifudin di Komisi IX DPR RI juga akan menyampaikan ini ke pimpinan Komisi IX. Menurutnya, pihak komisi bisa memanggil Kemenaker untuk melakukan teguran ke perusahaan. "Nanti dari Komisi IX, perusahaan dan Kemenaker akan dipertemukan dan mudah-mudahan kedua pekerja yang di-PHK secara sepihak ini dapat memperoleh lagi haknya" ujar Adang Sudradjat.

Terakhir, pihak DPP FSPASI meminta Fraksi PKS untuk membantu persoalan kedua anggota mereka "Kami sangat berharap Fraksi PKS DPR RI dapat memberi solusi kepada kedua anggota kami, terima kasih atas audiensi yang telah diberikan" ujar Hery Darmawan selaku perwakilan dari DPP FSPASI.

dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.,Av.
Anggota Komisi IX DPR RI

Kami akan menyampaikan ini ke pimpinan Komisi IX. pihak komisi bisa memanggil Kemenaker untuk melakukan teguran ke perusahaan. "Nanti dari Komisi IX, perusahaan dan Kemenaker akan dipertemukan dan mudah-mudahan kedua pekerja yang di-PHK secara sepihak ini dapat memperoleh lagi haknya"

Kunjungi Kanal Resmi Fraksi PKS DPR RI

- Website fraksi.pks.id
- Instagram fraksipksdprri
- Twitter @fraksipksdprri
- Facebook Fraksi PKS DPR RI
- Youtube PKSTV DPR RI

Nantikan Setiap Pekan